



**PROVINSI JAWA TIMUR
BUPATI TRENGGALEK**

**PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 27 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kesejahteraan umum, motivasi dan disiplin pegawai negeri sipil serta sebagai pemacu produktifitas perlu memberikan tambahan penghasilan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
- b. bahwa untuk menyesuaikan perkembangan kebutuhan hidup dan dalam rangka meningkatkan produktifitas pegawai negeri sipil maka perlu meningkatkan besaran tambahan penghasilan pegawai;
- c. bahwa dalam rangka menyesuaikan kebutuhan jabatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah perlu adanya penambahan nama jabatan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c maka Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Trenggalek perlu disesuaikan;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Trenggalek;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan;
15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1845);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2014 Nomor 12 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 39);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 68);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil dan/atau Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
7. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah penghasilan yang diberikan kepada PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
8. Disiplin Kerja adalah sikap menghormati, menghargai, patuh dan taat terhadap peraturan-peraturan yang berlaku, baik yang tertulis maupun tidak tertulis serta sanggup

menjalankannya dan tidak mengelak menerima sanksi-sanksinya apabila ia melanggar tugas dan wewenang yang diberikan.

9. Keterlambatan yang selanjutnya disebut TL adalah pegawai negeri sipil yang terlambat masuk kerja sesuai dengan ketentuan jam kerja pada bulan berjalan.
10. Pulang Sebelum Waktunya yang selanjutnya disingkat PSW adalah PNS yang meninggalkan kantor/pulang sebelum jam kerja dan jam pulang kerja yang ditentukan.
11. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.
12. Tidak Masuk yang selanjutnya disingkat TM adalah PNS yang tidak masuk kerja tanpa mengajukan Cuti.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pemberian TPP.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan kepastian hukum dalam pemberian TPP.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup dalam peraturan Bupati ini adalah:

- a. pemberian TPP;
- b. penghitungan TPP;
- c. tata cara pembayaran; dan
- d. pembiayaan.

BAB IV PEMBERIAN TPP

Pasal 4

- (1) TPP diberikan berdasarkan Kelas Jabatan dan Disiplin Kerja.
- (2) Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- (3) TPP diberikan setiap bulan.
- (4) Disiplin Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung menggunakan skor kehadiran.
- (5) Skor kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan berdasarkan indikator sebagai berikut:
 - a. keterlambatan masuk kerja;
 - b. kepulangan mendahului jam kerja;
 - c. Cuti; dan
 - d. tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah.
- (6) Skor kehadiran setiap bulan dicetak melalui aplikasi sistem informasi kehadiran pegawai.
- (7) Ketidakhadiran kerja karena dinas luar yang meliputi diklat, perjalanan dinas ke luar Daerah, perjalanan dinas ke luar negeri dan melaksanakan tugas kedinasan lainnya, dihitung sebagai hari masuk kerja.
- (8) Ketidakhadiran kerja karena libur nasional dan Cuti bersama yang jatuh pada hari kerja dihitung sebagai hari masuk kerja.
- (9) Ketidakhadiran kerja tanpa alasan yang sah dihitung sebagai hari tidak hadir masuk kerja.

Pasal 5

TPP tidak diberikan kepada:

- a. CPNS guru, PNS guru dan pengawas sekolah;
- b. CPNS dan PNS badan layanan umum Daerah;

- c. PNS pada unit kerja yang sudah menerima jasa pelayanan/remunerasi;
- d. PNS yang diberhentikan sementara dari jabatan negeri;
- e. PNS yang diberhentikan dan sedang mengajukan banding administratif kepada badan pertimbangan kepegawaian dan/atau mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN);
- f. PNS yang melaksanakan tugas belajar;
- g. PNS yang diperbantukan dan bekerja secara penuh di instansi lain;
- h. PNS yang sedang menjalani cuti besar atau cuti di luar tanggungan negara;
- i. PNS yang melaksanakan tugas sebagai sekretaris desa;
- j. PNS yang melaksanakan tugas sebagai kepala desa;
- k. PNS yang sedang menjalani masa bebas tugas untuk masa persiapan pensiun; dan
- l. PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah paling sedikit selama 10 (sepuluh) hari kerja secara komulatif dalam 1 (satu) bulan.

Pasal 6

- (1) Terhadap PNS yang mendapatkan tugas tambahan sebagai pelaksana tugas (Plt) atau pejabat (Pj), maka PNS yang bersangkutan diberikan TPP yang paling tinggi dari jabatan yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Terhadap PNS yang mendapatkan tugas tambahan sebagai pejabat (Pj) kepala desa maka PNS yang bersangkutan dapat memilih TPP atau penghasilan yang diterima sebagai Pj kepala desa.
- (3) Terhadap PNS yang dibebaskan sementara dari jabatan fungsional maupun jabatan pelaksana diberikan TPP sebesar 50% (lima puluh perseratus) sampai dengan diangkat kembali sebagai pejabat fungsional atau adanya penetapan lebih lanjut tentang status kepegawaiannya.

Pasal 7

PNS yang menjabat sebagai pelaksana tugas (Plt) atau penjabat (Pj) yang berasal dari instansi di luar Pemerintah Daerah dapat diberikan TPP berdasarkan beban kerja sesuai dengan kelas jabatannya apabila dari instansi asal tidak mendapatkan TPP.

Pasal 8

- (1) PNS yang mutasi ke Perangkat Daerah/unit kerja lain, maka pemberian TPP diberikan terhitung sejak melaksanakan tugas sesuai surat perintah melaksanakan tugas.
- (2) TPP diberikan kepada CPNS terhitung sejak menerima surat perintah melaksanakan tugas.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi CPNS formasi Tahun 2019 yakni pemberian TPP untuk CPNS formasi Tahun 2019 terhitung mulai bulan Agustus Tahun 2019.

BAB V

PENGHITUNGAN TPP

Pasal 9

- (1) TPP dihitung dengan rumus sebagai berikut:
TPP = (Harga Jabatan x Satuan Harga Jabatan)
- (2) Satuan harga jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan berdasarkan kategori Perangkat Daerah yang terdiri atas:
 - a. Perangkat Daerah kategori 1 (satu);
 - b. Perangkat Daerah kategori 2 (dua); dan
 - c. Perangkat Daerah kategori 3 (tiga).
- (3) Daftar harga jabatan dan satuan harga jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Penerimaan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah dikurangi ketidakhadiran.

- (5) Jenis ketidakhadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
- TL;
 - PSW;
 - Cuti; dan
 - TM.
- (6) Ketidakhadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dihitung dengan rumus:
- Ketidakhadiran (%) = Prosentase Jenis Ketidakhadiran (%) x Jumlah Hari Ketidakhadiran.**
- (7) Untuk TL dan PSW sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dan huruf b dapat diakumulasikan menjadi 1 (satu) apabila dalam 1 (satu) hari PNS melakukan TL dan PSW.
- (8) Prosentase untuk jenis ketidakhadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah sebagai berikut:

Tabel prosentase TL dan PSW

NO	KATEGORI	AKUMULASI TL DAN PSW PER HARI	PEMOTONGAN PER HARI
1.	TL 1 dan/atau PSW 1	1 menit sampai dengan 15 menit	0,25 %
2.	TL 2 dan/atau PSW 2	16 menit sampai dengan 30 menit	0,50 %
3.	TL 3 dan/atau PSW 3	31 menit sampai dengan 60 menit	1,00 %
4.	TL 4 dan/atau PSW 4	61 menit sampai dengan 90 menit	1,50 %
5.	TL 5 dan/atau PSW 5	lebih dari 90 menit atau hanya melakukan finger 1 (satu) kali	2,00 %

Tabel prosentase Cuti

NO	KATEGORI	KETERANGAN/ INTERVAL	PEMOTONGAN PER HARI
1.	CT (Cuti Tahunan)	Menjalani cuti tahunan	2,50 %
2.	CAP (Cuti Alasan Penting)	Menjalani cuti karena alasan penting	1,00 %
3.	CS (Cuti Sakit)	Menjalani cuti sakit	1,00 %
4.	CB (Cuti Bersalin)	Menjalani cuti bersalin	0,00 %

Tabel Prosentase TM

NO	KATEGORI	PEMOTONGAN PER HARI
1.	TM	4 %

(9) Bagi PNS yang TL/PSW/TM karena melaksanakan tugas diluar unit kerja/Perangkat Daerahnya tidak dikenakan pemotongan dengan dibuktikan surat perintah/disposisi dari atasan.

(10) Bagi PNS yang meninggal dunia tetap diberikan TPP pada bulan berkenaan sebesar 100% (seratus persen).

Pasal 10

Perhitungan TPP dilakukan secara manual berdasarkan Kelas Jabatan dan data kehadiran dalam Aplikasi Sistem Informasi Kehadiran (ASIK) Daerah.

BAB VI

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 11

- (1) Pembayaran TPP dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung.
- (2) Pembayaran TPP dapat diajukan tiap bulan atau beberapa bulan setelah bulan berjalan
- (3) Khusus untuk pembayaran bulan Desember diajukan pada bulan berkenaan.

Pasal 12

- (1) Pembayaran Tambahan Penghasilan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang dihitung dari jumlah Tambahan Penghasilan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. PNS golongan I dan golongan II dikenakan pajak sebesar 0% (nol persen);

- b. PNS golongan III dikenakan pajak sebesar 5 % (lima persen); dan
 - c. PNS Golongan IV dikenakan pajak sebesar 15 % (lima belas persen).
- (2) Pengenaan PPh Pasal 21 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berubah menyesuaikan ketentuan perpajakan.

Pasal 13

Pengajuan SPP-LS TPP untuk penerbitan SPM-LS Tambahan Penghasilan dilengkapi dengan:

- a. keputusan Pengguna Anggaran tentang Penerima TPP;
- b. daftar perhitungan ketidakhadiran;
- c. daftar perhitungan penerimaan TPP;
- d. surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak; dan
- e. ID Billing PPh Pasal 21.

Pasal 14

SPM-LS TPP diajukan ke Bendahara Umum Daerah dilampiri dengan:

- a. keputusan Pengguna Anggaran tentang Penerima TPP;
- b. daftar perhitungan ketidakhadiran;
- c. daftar perhitungan penerimaan TPP;
- d. surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak; dan
- e. ID Billing PPh Pasal 21.

Pasal 15

Format daftar perhitungan ketidakhadiran pegawai, daftar perhitungan penerimaan TPP, dan surat pernyataan tanggung jawab mutlak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 16

Segala biaya yang diperlukan untuk pemberian TPP dibebankan pada APBD.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 17

- (1) Besaran TPP yang diterima oleh PNS dengan kelas jabatan 1 (satu) sampai dengan kelas jabatan 3 (tiga) dengan klasifikasi sebagai berikut:
 - a. pada Perangkat Daerah kategori 1 (satu) diberikan TPP sebesar Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
 - b. pada Perangkat Daerah kategori 2 (dua) diberikan TPP sebesar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah); dan
 - c. pada Perangkat Daerah kategori 3 (tiga) diberikan TPP sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).
- (2) Terhadap nama jabatan yang belum tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini, maka kelas jabatan, harga jabatan dan satuan harga jabatan disetarakan dengan jenjang jabatan yang ada pada Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- (3) Pemberian TPP berdasarkan Peraturan Bupati ini dihitung mulai bulan Agustus Tahun 2019.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2018 Nomor 62), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 27 Agustus 2019
BUPATI TRENGGALEK,
TTD
MOCHAMAD NUR ARIFIN

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 27 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,
TTD
JOKO IRIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2019 NOMOR 27

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



ANIK SUWARNI

Nip . 19650919 199602 2 001

**LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 27 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI
SIPIIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK**

DAFTAR HARGA JABATAN DAN SATUAN HARGA JABATAN

NO	KATEGORI OPD	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	HARGA JABATAN	SATUAN HARGA JABATAN
I	KATEGORI 1				
	1. SEKRETARIAT DAERAH	SEKRETARIS DAERAH	15	3.555	2.050
		STAF AHLI BUPATI BIDANG PEMERINTAHAN, HUKUM DAN POLITIK	13	2.715	2.050
		STAF AHLI BUPATI BIDANG BIDANG EKONOMI, KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	13	2.715	2.050
		STAF AHLI BUPATI BIDANG KEMASYARAKATAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA	13	2.715	2.050
		ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	14	3.030	2.050
		KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	12	2.315	2.050
		KEPALA SUB BAGIAN OTONOMI DAERAH	8	1.295	2.050
		PENGOLAH DATA	6	690	2.050
		PENGADMINISTRASI KEUANGAN	5	490	2.050
		KEPALA SUB BAGIAN PEMERINTAHAN UMUM DAN KERJASAMA	8	1.295	2.050
		PENGOLAH DATA	6	690	2.050
		PENGADMINISTRASI KEUANGAN	5	490	2.050
		KEPALA SUB BAGIAN ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	9	1.430	2.050
		PENGOLAH DATA	6	690	2.050
		ANALIS BATAS WILAYAH	7	890	2.050
		KEPALA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	12	2.315	2.050
		KEPALA SUB BAGIAN PEMBERDAYAAN	8	1.295	2.050
		PENGOLAH DATA	6	690	2.050

PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	2.050
KEPALA SUB BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	8	1.295	2.050
PENGOLAH DATA	6	690	2.050
PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	2.050
KEPALA SUB BAGIAN PEMBINAAN MENTAL SPIRITUAL	8	1.295	2.050
PENGADMINISTRASI KEUANGAN	5	490	2.050
PENGOLAH DATA	6	690	2.050
KEPALA BAGIAN HUKUM	12	2.315	2.050
KEPALA SUB BAGIAN DOKUMENTASI DAN PUBLIKASI HUKUM	8	1.295	2.050
PENGELOLA INFORMASI PRODUK HUKUM	6	690	2.050
PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	2.050
PENGOLAH DATA	6	690	2.050
KEPALA SUB BAGIAN PERUNDANG-UNDANGAN	9	1.430	2.050
ANALIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	7	890	2.050
PENGELOLA PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN	6	690	2.050
ANALIS HUKUM	7	890	2.050
PENGADMINISTRASI KEUANGAN	5	490	2.050
KEPALA SUB BAGIAN PEMBINAAN DAN BANTUAN HUKUM	9	1.430	2.050
ANALIS HUKUM	7	890	2.050
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	14	3.030	2.050
KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	12	2.315	2.050
KEPALA SUB BAGIAN EVALUASI & PENGEMBANGAN PROGRAM PEREKONOMIAN	8	1.295	2.050
PENGOLAH DATA	6	690	2.050
PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	2.050
PENGADMINISTRASI KEUANGAN	5	490	2.050

KEPALA SUB BAGIAN SARANA DAN PRASARANA PEREKONOMIAN	8	1.295	2.050
PENGOLAH DATA	6	690	2.050
ANALIS KEUANGAN	7	890	2.050
KEPALA SUB BAGIAN SUMBER DAYA ALAM	8	1.295	2.050
PENGOLAH DATA	6	690	2.050
PENGADMINISTRASI KEUANGAN	5	490	2.050
KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA	12	2.315	2.050
KEPALA SUB BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	8	1.295	2.050
PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	2.050
PENGOLAH DATA	6	690	2.050
KEPALA SUB BAGIAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK	8	1.295	2.050
PENGOLAH DATA	6	690	2.050
PENGELOLA DATA	6	690	2.050
KEPALA SUB BAGIAN PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG/JASA	8	1.295	2.050
PENGOLAH DATA	6	690	2.050
PENGELOLA UNIT LAYANAN PENGADAAN	6	690	2.050
PRANATA BARANG DAN JASA	6	690	2.050
ANALIS DATA DAN INFORMASI	7	890	2.050
KEPALA BAGIAN ORGANISASI	12	2.315	2.050
KEPALA SUB BAGIAN PENINGKATAN KINERJA DAN REFORMASI BIROKRASI	9	1.430	2.050
PENGOLAH DATA	6	690	2.050
ANALIS KINERJA	7	890	2.050
PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	2.050
KEPALA SUB BAGIAN KELEMBAGAAN DAN ANALISIS JABATAN	9	1.430	2.050
PENGOLAH DATA	6	690	2.050
PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	2.050
ANALIS KELEMBAGAAN	7	890	2.050
ANALIS JABATAN	7	890	2.050
KEPALA SUB BAGIAN TATA LAKSANA DAN PELAYANAN PUBLIK	9	1.430	2.050

ANALIS PELAYANAN	7	890	2.050
PENGOLAH DATA	6	690	2.050
PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	2.050
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	14	3.030	2.050
KEPALA BAGIAN PERENCANAAN DAN ANGGARAN	12	2.315	2.050
KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN PELAPORAN	8	1.295	2.050
PENGOLAH DATA	6	690	2.050
PENGADMINISTRASI KEUANGAN	5	490	2.050
ANALIS PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN	7	890	2.050
KEPALA SUB BAGIAN PELAYANAN ADMINISTRASI KEUANGAN	9	1.430	2.050
BENDAHARA	7	890	2.050
VERIFIKATOR KEUANGAN	6	690	2.050
PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	2.050
KEPALA BAGIAN UMUM DAN PERLENGKAPAN	12	2.315	2.050
KEPALA SUB BAGIAN TU DAN KEPEGAWAIAN	8	1.295	2.050
PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	2.050
PENGOLAH DATA	6	690	2.050
PRAMU BAKTI	1	190	
PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	5	490	2.050
SEKRETARIS	6	690	2.050
PRANATA KEARSIPAN	6	690	2.050
KEPALA SUB BAGIAN PERLENGKAPAN	8	1.295	2.050
PENGADMINISTRASI KEUANGAN	5	490	2.050
PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	2.050
PENGEMUDI	3	340	
PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	6	690	2.050
PRAMU BAKTI	1	190	
KEPALA SUB BAGIAN TU PIMPINAN	8	1.295	2.050
SEKRETARIS	6	690	2.050
PENGOLAH DATA	6	690	2.050

		KEPALA BAGIAN PROTOKOL DAN RUMAH TANGGA	12	2.315	2.050	
		KEPALA SUB BAGIAN PROTOKOL	8	1.295	2.050	
		PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	2.050	
		PETUGAS PROTOKOL	5	490	2.050	
		PENGADMINISTRASI KEUANGAN	5	490	2.050	
		AJUDAN	6	690	2.050	
		KEPALA SUB BAGIAN HUMAS	8	1.295	2.050	
		PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	2.050	
		PENGOLAH DATA	6	690	2.050	
		PENYUSUN BAHAN INFORMASI	7	890	2.050	
		PENGADMINISTRASI KEUANGAN	5	490	2.050	
		ANALIS HUMAS DAN PROTOKOL	7	890	2.050	
		KEPALA SUB BAGIAN RUMAH TANGGA	8	1.295	2.050	
		TEKNISI PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA	5	490	2.050	
		PENGOLAH DATA	6	690	2.050	
		PRANATA TAMAN	6	690	2.050	
		PRAMU BAKTI	1	190		
		PRANATA JAMUAN	6	690	2.050	
		PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	2.050	
		PENGEMUDI	3	340		
		TEKNISI SARANA DAN PRASARANA	5	490	2.050	
		PENGADMINISTRASI KEUANGAN	5	490	2.050	
	2. INSPEKTORAT	INSPEKTUR	14	3.030	2.050	
		SEKRETARIS	12	2.140	2.050	
		KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	8	1.295	2.050	
		PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	2.050	
		PRANATA KEARSIPAN	6	690	2.050	
		PENGEMUDI	3	340	2.050	
		PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	6	690	2.050	
		PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	5	490	2.050	
		PENGOLAH DATA	6	690	2.050	
		KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN, PERENCANAAN DAN PELAPORAN	8	1.295	2.050	

		PENGADMINISTRASI KEUANGAN	5	490	2.050
		PENGELOLA DATA PELAKSANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN	6	690	2.050
		PENGADMINISTRASI PERENCANAAN DAN PROGRAM	5	490	2.050
		PENGELOLA PROGRAM DAN KEGIATAN	6	690	2.050
		PENYUSUN PROGRAM ANGGARAN DAN PELAPORAN	7	890	2.050
		PENYUSUN RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN	7	890	2.050
		PENGELOLA BAHAN PERENCANAAN	6	690	2.050
		BENDAHARA	7	890	2.050
		PENGOLAH DATA LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA	6	690	2.050
		INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH I	11	1.990	2.050
		INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH II	11	1.990	2.050
		INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH III	11	1.990	2.050
		AUDITOR KEPEGAWAIAN AHLI (MADYA)	11	1.930	2.050
		AUDITOR KEPEGAWAIAN AHLI (MUDA)	9	1.355	2.050
		AUDITOR KEPEGAWAIAN AHLI (PERTAMA)	8	1.280	2.050
		AUDITOR AHLI (MADYA)	11	1.930	2.050
		AUDITOR AHLI (MUDA)	9	1.355	2.050
		AUDITOR AHLI (PERTAMA)	8	1.280	2.050
		AUDITOR TERAMPIL (PELAKSANA)	6	740	2.050
		PENGAWAS PEMERINTAHAN AHLI (MADYA)	11	1.930	2.050
3.	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	14	3.030	2.050
		SEKRETARIS	12	2.140	2.050
		KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	8	1.295	2.050
		PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	6	690	2.050
		PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	2.050
		PRANATA KEARSIPAN	6	690	2.050
		PENGOLAH DATA	6	690	2.050

PETUGAS KEAMANAN	3	340	
KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN	9	1.430	2.050
BENDAHARA	7	890	2.050
PENGADMINISTRASI KEUANGAN	5	490	2.050
ANALIS KEUANGAN	7	890	2.050
VERIFIKATOR DATA LAPORAN KEUANGAN	6	690	2.050
KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN PELAPORAN	9	1.430	2.050
ANALIS DATA DAN INFORMASI	7	890	2.050
ANALIS PERENCANAAN	7	890	2.050
ANALIS RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN	7	890	2.050
PENGOLAH DATA	6	690	2.050
PENGELOLA DATA	6	690	2.050
PENGADMINISTRASI PERENCANAAN DAN PROGRAM	5	490	2.050
KEPALA BIDANG PERENCANAAN FISIK DAN PRASARANA	11	2.045	2.050
KEPALA SUB BIDANG PRASARANA WILAYAH DAN SUMBER DAYA AIR	9	1.430	2.050
ANALIS SISTEM JARINGAN JALAN JEMBATAN	7	890	2.050
ANALIS SUMBER DAYA AIR	7	890	2.050
PENGELOLA TEKNIS SURVEY JARINGAN PRASARANA DAN PELAYANAN	6	690	2.050
PENGELOLA DATA	6	690	2.050
PENGADMINISTRASI PERENCANAAN DAN PROGRAM	5	490	2.050
KEPALA SUB BIDANG KECIPTAKARYAAN DAN PERUMAHAN	9	1.430	2.050
ANALIS BANGUNAN GEDUNG DAN PERMUKIMAN	7	890	2.050
ANALIS BANGUNAN DAN PERUMAHAN	7	890	2.050
KEPALA SUB BIDANG PENGEMBANGAN WILAYAH DAN LINGKUNGAN HIDUP	9	1.430	2.050
PENYUSUN RENCANA TATA RUANG	7	890	2.050
ANALIS PENGEMBANGAN WILAYAH	7	890	2.050

PENGADMINISTRASI PERENCANAAN DAN PROGRAM	5	490	2.050
KEPALA BIDANG PERENCANAAN PEREKONOMIAN	11	2.045	2.050
KEPALA SUB BIDANG PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	8	1.295	2.050
PENGADMINISTRASI PERENCANAAN DAN PROGRAM	5	490	2.050
ANALIS PERENCANAAN	7	890	2.050
KEPALA SUB BIDANG KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN	9	1.430	2.050
ANALIS PERENCANAAN	7	890	2.050
PENGADMINISTRASI PERENCANAAN DAN PROGRAM	5	490	2.050
KEPALA SUB BIDANG PERINDUSTRIAN, TENAGA KERJA DAN PENANAMAN MODAL	8	1.295	2.050
ANALIS PERENCANAAN	7	890	2.050
PENGADMINISTRASI PERENCANAAN DAN PROGRAM	5	490	2.050
KEPALA BIDANG PERENCANAAN SOSIAL, BUDAYA DAN PEMERINTAHAN	11	2.045	2.050
KEPALA SUB BIDANG SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	8	1.295	2.050
PENGADMINISTRASI PERENCANAAN DAN PROGRAM	5	490	2.050
ANALIS SOSIAL BUDAYA	7	890	2.050
ANALIS PERENCANAAN	7	890	2.050
KEPALA SUB BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	9	1.430	2.050
ANALIS PERENCANAAN	7	890	2.050
ANALIS PROGRAM PEMBANGUNAN	7	890	2.050
PENGADMINISTRASI PERENCANAAN DAN PROGRAM	5	490	2.050
KEPALA SUB BIDANG PENDIDIKAN, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	9	1.430	2.050
ANALIS PARIWISATA	7	890	2.050
ANALIS PERENCANAAN	7	890	2.050

		PENGADMINISTRASI PERENCANAAN DAN PROGRAM	5	490	2.050
		KEPALA BIDANG PENELITIAN, PENGEMBANGAN, PENGENDALIAN DAN INOVASI DAERAH	11	2.045	2.050
		KEPALA SUB BIDANG PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH	9	1.430	2.050
		ANALIS PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN	7	890	2.050
		PENGADMINISTRASI PERENCANAAN DAN PROGRAM	5	490	2.050
		KEPALA SUB BIDANG PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN INOVASI DAERAH	8	1.295	2.050
		ANALIS PENGEMBANGAN WILAYAH	7	890	2.050
		PENGADMINISTRASI PERENCANAAN DAN PROGRAM	5	490	2.050
		ANALIS PEMBANGUNAN	7	890	2.050
		KEPALA SUB BIDANG PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN	9	1.430	2.050
		ANALIS PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN	7	890	2.050
		PENGELOLA PENGENDALIAN, MONITORING DAN EVALUASI PEMBANGUNAN	6	690	2.050
		PENGADMINISTRASI PERENCANAAN DAN PROGRAM	5	490	2.050
		PERENCANA AHLI PERTAMA	8	1.280	2.050
4.	BADAN KEUANGAN DAERAH	KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH	14	3.030	2.050
		SEKRETARIS	12	2.140	2.050
		KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN PELAPORAN	8	1.295	2.050
		PENGOLAH DATA	6	690	2.050
		ANALIS PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN	7	890	2.050
		PENGADMINISTRASI PERENCANAAN DAN PROGRAM	5	490	2.050

KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	8	1.295	2.050
PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	5	490	2.050
PENGEMUDI	3	340	
PENGOLAH DATA	6	690	2.050
PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	6	690	2.050
KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN	9	1.430	2.050
BENDAHARA	7	890	2.050
PENGADMINISTRASI KEUANGAN	5	490	2.050
VERIFIKATOR DATA LAPORAN KEUANGAN	6	690	2.050
PENGOLAH DATA PENGELOLAAN KEUANGAN	6	690	2.050
KEPALA BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN	11	2.045	2.050
KEPALA SUB BIDANG AKUNTANSI DAN PENDAPATAN	8	1.295	2.050
PENATA LAPORAN KEUANGAN	7	890	2.050
PENGOLAH DATA LAPORAN REALISASI ANGGARAN	6	690	2.050
KEPALA SUB BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN BELANJA	8	1.295	2.050
PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN	7	890	2.050
PENGOLAH DATA LAPORAN REALISASI ANGGARAN	6	690	2.050
PENGELOLA DATA BELANJA DAN LAPORAN KEUANGAN	6	690	2.050
KEPALA SUB BIDANG PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN APBD	8	1.295	2.050
PENATA LAPORAN KEUANGAN	7	890	2.050
PENGELOLA PELAPORAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN APBD	6	690	2.050
KEPALA BIDANG ASET	11	2.045	2.050

KEPALA SUB BIDANG PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PEMELIHARAAN ASET	8	1.295	2.050
PENYUSUN KEBUTUHAN BARANG INVENTARIS	7	890	2.050
PENGELOLA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH	6	690	2.050
PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	6	690	2.050
PENGELOLA PENATAAN SARANA DAN PRASARANA	6	690	2.050
KEPALA SUB BIDANG INVENTARISASI DAN AKUISISI ASET	8	1.295	2.050
PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	6	690	2.050
PENYUSUN RENCANA HASIL TELAAHAN USUL PENGHAPUSAN BARANG	7	890	2.050
PENGELOLA AKUISISI	6	690	2.050
KEPALA SUB BIDANG PEMBINAAN DAN PENATAUSAHAAN ASET	8	1.295	2.050
PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	6	690	2.050
PENGELOLA DATA REKONSILIASI	6	690	2.050
PENGOLAH DATA	6	690	2.050
KEPALA BIDANG PENAGIHAN DAN PELAYANAN PAJAK	11	2.045	2.050
KEPALA SUB BIDANG PEMERIKSAAN DAN PENAGIHAN	8	1.295	2.050
PENGELOLA PENAGIHAN DAN PENGAWASAN	6	690	2.050
PENGOLAH DATA PENAGIHAN PAJAK	6	690	2.050
PENGOLAH DATA PEMERIKSAAN PAJAK	6	690	2.050
KEPALA SUB BIDANG PELAYANAN	8	1.295	2.050
PENGELOLA DATA PELAYANAN PERPAJAKAN	6	690	2.050
KEPALA SUB BIDANG PENERIMAAN DAN PEMBUKUAN	9	1.430	2.050
BENDAHARA	7	890	2.050
PENGELOLA WAJIB PAJAK/ RETRIBUSI DAERAH	6	690	2.050

PENGELOLA PELAPORAN DATA PENERIMAAN	6	690	2.050
KEPALA BIDANG ANGGARAN	11	2.045	2.050
KEPALA SUB BIDANG ADMINISTRASI EVALUASI ANGGARAN	8	1.295	2.050
VERIFIKATOR ANGGARAN	6	690	2.050
KEPALA SUB BIDANG PENYUSUNAN ANGGARAN	8	1.295	2.050
PENGOLAH DATA PENGANGGARAN	6	690	2.050
PENGOLAH DATA PERENCANAAN PENGANGGARAN	6	690	2.050
KEPALA SUB BIDANG PERENCANAAN ANGGARAN	8	1.295	2.050
PENGOLAH DATA PERENCANAAN PENGANGGARAN	6	690	2.050
KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN	11	2.045	2.050
KEPALA SUB BIDANG PERBENDAHARAAN BELANJA TIDAK LANGSUNG	8	1.295	2.050
PENATA KEUANGAN	7	890	2.050
PENGELOLA GAJI	6	690	2.050
PENGELOLA DATABASE SURAT PERINTAH MEMBAYAR	6	690	2.050
KEPALA SUB BIDANG PENGELOLAAN KAS DAERAH	8	1.295	2.050
PENGELOLA DATA KEUANGAN DAERAH	6	690	2.050
PENATA LAPORAN KEUANGAN	7	890	2.050
KEPALA SUB BIDANG PERBENDAHARAAN BELANJA LANGSUNG	8	1.295	2.050
VERIFIKATOR KEUANGAN	6	690	2.050
PENGELOLA DATA PENCAIRAN DANA	6	690	2.050
KEPALA BIDANG PENDATAAN DAN PENETAPAN PAJAK	11	2.045	2.050
KEPALA SUB BIDANG INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI	8	1.295	2.050
PENGOLAH DATA PENDATAAN, PEMETAAN, DAN PENILAIAN	6	690	2.050

		PENGOLAH DATA PENGUKURAN DAN PEMETAAN	6	690	2.050
		PENGELOLA DATA DAN POTENSI PAJAK	6	690	2.050
		KEPALA SUB BIDANG PENETAPAN	8	1.295	2.050
		PENGELOLA PBB P2 DAN BPHTB	6	690	2.050
		KEPALA SUB BIDANG PENDAFTARAN DAN PENDATAAN	8	1.295	2.050
		PENGELOLA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN PAJAK/ RETRIBUSI	6	690	2.050
		ANALIS KEBIJAKAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	7	890	2.050
II.	KATEGORI 2				
	1. SEKRETARIAT DPRD	SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	14	2.865	1.950
		KEPALA BAGIAN UMUM	11	2.090	1.950
		KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA	8	1.295	1.950
		PENGELOLA DATA	6	690	1.950
		PRANATA KEARSIPAN	6	690	1.950
		PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	1.950
		KEPALA SUB BAGIAN PERLENGKAPAN DAN RUMAH TANGGA	8	1.295	1.950
		PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	6	690	1.950
		PRAMU BAKTI	1	190	
		PENGEMUDI	3	340	
		KEPALA BAGIAN PERSIDANGAN	11	2.090	1.950
		KEPALA SUB BAGIAN FASILITASI RAPAT DAN PROTOKOL	8	1.295	1.950
		PENGOLAH DATA	6	690	1.950
		KEPALA SUB BAGIAN FASILITASI FUNGSI PENGAWASAN DAN ANGGARAN	8	1.295	1.950
		PENGOLAH DATA	6	690	1.950
		ANALIS PRODUK HUKUM	7	890	1.950
		KEPALA BAGIAN KEUANGAN	11	2.090	1.950
		KEPALA SUB BAGIAN PERBENDAHARAAN DAN PELAPORAN	9	1.430	1.950
		BENDAHARA	7	890	1.950

		PENGADMINISTRASI KEUANGAN	5	490	1.950
		PENGELOLA DATA	6	690	1.950
		KEPALA SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN PENGANGGARAN	8	1.295	1.950
		PENGOLAH DATA	6	690	1.950
		KEPALA SUB BAGIAN VERIFIKASI DAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN	8	1.295	1.950
		VERIFIKATOR DATA LAPORAN KEUANGAN	6	690	1.950
		KEPALA BAGIAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PENGUATAN KAPASITAS	11	2.090	1.950
		KEPALA SUB BAGIAN FASILITASI PENGUATAN KAPASITAS	8	1.295	1.950
		PENGELOLA DATA	6	690	1.950
		ANALIS PRODUK HUKUM	7	890	1.950
		ANALIS HUKUM	7	890	1.950
		KEPALA SUB BAGIAN DOKUMENTASI, INFORMASI DAN ASPIRASI MASYARAKAT	8	1.295	1.950
		PENGELOLA DATA	6	690	1.950
		PENYUSUN BAHAN INFORMASI	7	890	1.950
		KEPALA SUB BAGIAN FASILITASI PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM	8	1.295	1.950
		PENGELOLA DATA	6	690	1.950
		ANALIS PRODUK HUKUM	7	890	1.950
2.	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	14	2.865	1.950
		SEKRETARIS	12	2.115	1.950
		PENILIK AHLI (MADYA)	11	1.930	1.950
		PENILIK AHLI (MUDA)	9	1.355	1.950
		PAMONG BELAJAR AHLI (MADYA)	11	1.930	1.950
		PAMONG BELAJAR AHLI (MUDA)	9	1.355	1.950
		KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN EVALUASI PROGRAM	9	1.430	1.950
		PENGADMINISTRASI PERENCANAAN DAN PROGRAM	5	490	1.950
		ANALIS PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN	7	890	1.950

PENGOLAH DATA	6	690	1.950
KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN	9	1.430	1.950
PENGADMINISTRASI KEUANGAN	5	490	1.950
BENDAHARA	7	890	1.950
VERIFIKATOR KEUANGAN	6	690	1.950
PENGELOLA GAJI	6	690	1.950
PENGOLAH DAFTAR GAJI	6	690	1.950
ANALIS LAPORAN REALISASI ANGGARAN	7	890	1.950
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	8	1.295	1.950
PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	1.950
PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	5	490	1.950
PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	6	690	1.950
PRANATA BARANG DAN JASA	6	690	1.950
PRAMU BAKTI	1	190	
PENGEMUDI	3	340	
PENGELOLA KENDARAAN	6	690	1.950
SEKOLAH DASAR			
PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	5	490	1.950
PENGADMINISTRASI KEUANGAN	5	490	1.950
PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	1.950
PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	6	690	1.950
PENGELOLA DATA	6	690	1.950
PETUGAS KEAMANAN	3	340	1.950
PRAMU BAKTI	1	190	
KEPALA BIDANG PEMBINAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	11	2.045	1.950
KEPALA SEKSI TENAGA PENDIDIK	8	1.295	1.950
PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	1.950
ANALIS PENDIDIKAN	7	890	1.950
PENGOLAH DATA	6	690	1.950
KEPALA SEKSI TENAGA KEPENDIDIKAN	8	1.295	1.950
ANALIS TENAGA KEPENDIDIKAN	7	890	1.950
PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	1.950
PENGOLAH DATA	6	690	1.950

SEKOLAH MENENGAH PERTAMA			
ANALIS TATA USAHA	7	890	1.950
PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	5	490	1.950
PENGADMINISTRASI KESISWAAN	5	490	1.950
PENGADMINISTRASI KEUANGAN	5	490	1.950
PENGADMINISTRASI PERPUSTAKAAN	5	490	1.950
PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	1.950
PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	6	690	1.950
PENGELOLA DATA	6	690	1.950
PENGELOLA PERPUSTAKAAN	6	690	1.950
PENGOLAH DATA	6	690	1.950
PETUGAS KEAMANAN	3	340	1.950
PRAMU BAKTI	1	190	
KEPALA SEKSI PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	8	1.295	1.950
PENGOLAH DATA	6	690	1.950
PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	1.950
KEPALA BIDANG PEMBINAAN SEKOLAH DASAR	11	2.045	1.950
KEPALA SEKSI MANAJEMEN SEKOLAH DASAR	8	1.295	1.950
PENGOLAH DATA	6	690	1.950
PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	1.950
PENGADMINISTRASI KEUANGAN	5	490	1.950
PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	1.950
KEPALA SEKSI SARANA DAN PRASARANA SEKOLAH DASAR	8	1.295	1.950
PENGOLAH DATA	6	690	1.950
PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	1.950
KEPALA SEKSI KURIKULUM SEKOLAH DASAR	8	1.295	1.950
PENGOLAH DATA	6	690	1.950
PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	1.950

KEPALA BIDANG PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	11	2.045	1.950
KEPALA SEKSI SARANA DAN PRASARANA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	8	1.295	1.950
PENGOLAH DATA	6	690	1.950
PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	1.950
KEPALA SEKSI KURIKULUM SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	8	1.295	1.950
PENGOLAH DATA	6	690	1.950
PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	1.950
KEPALA SEKSI MANAJEMEN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	8	1.295	1.950
PENGOLAH DATA	6	690	1.950
PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	1.950
KEPALA BIDANG PEMUDA DAN OLAHRAGA	11	2.045	1.950
KEPALA SEKSI SARANA DAN PRASARANA PEMUDA DAN OLAHRAGA	8	1.295	1.950
PENGOLAH DATA	6	690	1.950
ANALIS KEOLAHRAGAAN	7	890	1.950
KEPALA SEKSI PEMUDA DAN PRAMUKA	8	1.295	1.950
PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	1.950
PENGOLAH DATA	6	690	1.950
KEPALA SEKSI OLAHRAGA	8	1.295	1.950
PENGOLAH DATA	6	690	1.950
PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	1.950
KEPALA BIDANG PEMBINAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT	11	2.045	1.950
KEPALA SEKSI PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN KELUARGA	8	1.295	1.950
PENGELOLA PEMBINAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	6	690	1.950
PENGELOLA KELEMBAGAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	6	690	1.950

		KEPALA SEKSI PENDIDIKAN MASYARAKAT, KURSUS DAN KESETARAAN	8	1.295	1.950
		PENGELOLA DATA KELEMBAGAAN KURSUS DAN PELATIHAN	6	690	1.950
		ANALIS KELEMBAGAAN KURSUS DAN PELATIHAN	7	890	1.950
		ANALIS KURSUS DAN KESETARAAN	7	890	1.950
		KEPALA SEKSI SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT	8	1.295	1.950
		PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	1.950
		PENGOLAH DATA	6	690	1.950
3.	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	KEPALA DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	14	2.865	1.950
		SEKRETARIS	11	2.045	1.950
		KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN INFORMASI	9	1.430	1.950
		PENGOLAH DATA	6	690	1.950
		ANALIS PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN	7	890	1.950
		KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN PENGELOLAAN ASET	9	1.430	1.950
		BENDAHARA	7	890	1.950
		PENGELOLA GAJI	6	690	1.950
		PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	6	690	1.950
		PENGADMINISTRASI KEUANGAN	5	490	1.950
		ANALIS KEUANGAN	7	890	1.950
		VERIFIKATOR KEUANGAN	6	690	1.950
		KEPALA SUB BAGIAN HUKUM, KEPEGAWAIAN DAN UMUM	8	1.295	1.950
		PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	1.950
		PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	5	490	1.950
		PENGEMUDI	3	340	
		PENGOLAH DATA	6	690	1.950
		PENGELOLA KEPEGAWAIAN	6	690	1.950

PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	6	690	1.950
KEPALA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT	11	2.045	1.950
KEPALA SEKSI KESEHATAN KELUARGA DAN GIZI MASYARAKAT	9	1.430	1.950
PENGELOLA PROGRAM GIZI	6	690	1.950
PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	1.950
ANALIS GIZI	7	890	1.950
ANALIS KESEHATAN	7	890	1.950
ANALIS KESEHATAN IBU DAN ANAK	7	890	1.950
KEPALA SEKSI PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	9	1.430	1.950
PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	1.950
PENGELOLA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	6	690	1.950
ANALIS KESEHATAN	7	890	1.950
KEPALA SEKSI KESEHATAN LINGKUNGAN, KESEHATAN KERJA DAN KESEHATAN OLAH RAGA	9	1.430	1.950
PEMERIKSA SANITASI	7	890	1.950
PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	1.950
KEPALA BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT	11	2.045	1.950
KEPALA SEKSI SURVEILANS DAN IMUNISASI	9	1.430	1.950
PENGELOLA PENGAMATAN PENYAKIT DAN IMUNISASI	6	690	1.950
ANALIS KESEHATAN	7	890	1.950
KEPALA SEKSI PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR	8	1.295	1.950
PENGELOLA PEMBERANTASAN PENYAKIT MENULAR LANGSUNG	6	690	1.950
PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	1.950
PRAMU LABORATORIUM	1	190	

KEPALA SEKSI PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT TIDAK MENULAR DAN KESEHATAN JIWA	8	1.295	1.950
PENGELOLA PENYAKIT TIDAK MENULAR	6	690	1.950
ANALIS KESEHATAN	7	890	1.950
KEPALA BIDANG SUMBER DAYA KESEHATAN	11	2.045	1.950
KEPALA SEKSI SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	9	1.430	1.950
PENGELOLA DATA	6	690	1.950
PENGADMINISTRASI PELATIHAN	5	490	1.950
ANALIS PENGEMBANGAN SDM APARATUR	7	890	1.950
PENGELOLA LABORATORIUM	6	690	1.950
PENGOLAH DATA	6	690	1.950
KEPALA SEKSI ALAT KESEHATAN	8	1.295	1.950
PENGELOLA OBAT DAN ALAT-ALAT KESEHATAN	6	690	1.950
INSPEKTUR SARANA DAN PRASARANA FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN	7	890	1.950
KEPALA SEKSI KEFARMASIAN	9	1.430	1.950
PENGELOLA KEFARMASIAN	6	690	1.950
ANALIS OBAT DAN MAKANAN	7	890	1.950
KEPALA BIDANG PELAYANAN KESEHATAN	11	2.045	1.950
KEPALA SEKSI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER	8	1.295	1.950
PENGOLAH DATA PEMBAYARAN JAMINAN KESEHATAN	6	690	1.950
PENGELOLA PELAYANAN KESEHATAN	6	690	1.950
PENGELOLA PROGRAM JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN	6	690	1.950
KEPALA SEKSI PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN	8	1.295	1.950
PENGELOLA DATA	6	690	1.950
PENGELOLA RUJUKAN KESEHATAN	6	690	1.950

KEPALA SEKSI PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL	8	1.295	1.950
PENGELOLA DATA	6	690	1.950
PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	1.950
KEPALA BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	11	2.045	1.950
KEPALA SEKSI KELUARGA SEJAHTERA DAN PEMBANGUNAN KELUARGA	8	1.295	1.950
PENGELOLA PEMBINAAN KETAHANAN KELUARGA	6	690	1.950
KEPALA SEKSI PENGENDALIAN PENDUDUK, PENYULUHAN DAN PENGGERAKAN	9	1.430	1.950
PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	1.950
KEPALA SEKSI KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN REPRODUKSI	9	1.430	1.950
PENGELOLA ADVOKASI KONSELING DAN PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN REPRODUKSI	6	690	1.950
PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	1.950
KEPALA UPT LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH	9	1.430	1.950
PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	1.950
PENGELOLA LABORATORIUM	6	690	1.950
PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN TERAMPIL PELAKSANA (PEMULA)	5	490	1.950
KEPALA UPT INSTALASI FARMASI	9	1.430	1.950
PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	1.950
PETUGAS KEAMANAN	3	340	
PENGADMINISTRASI KEUANGAN	5	490	1.950
PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	6	690	1.950
PENGEMUDI	3	340	
ASISTEN APOTEKER TERAMPIL PELAKSANA	5	490	1.950

		(PEMULA)			
		APOTEKER AHLI (PERTAMA)	8	1.280	1.950
4.	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	14	2.865	1.950
		SEKRETARIS	12	2.115	1.950
		KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	9	1.430	1.950
		PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	6	690	1.950
		PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	1.950
		PRAMU BAKTI	1	190	
		PENGOLAH DATA	6	690	1.950
		ANALIS RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN	7	890	1.950
		KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN, PERENCANAAN DAN PELAPORAN	9	1.430	1.950
		PENGELOLA DATA	6	690	1.950
		ANALIS RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN	7	890	1.950
		BENDAHARA	7	890	1.950
		PENGADMINISTRASI KEUANGAN	5	490	1.950
		KEPALA BIDANG FORMASI DAN INFORMASI	11	2.045	1.950
		KEPALA SUB BIDANG FORMASI DAN PENGADAAN	9	1.430	1.950
		PENGOLAH DATA	6	690	1.950
		ANALIS SUMBER DAYA APARATUR	7	890	1.950
		KEPALA SUB BIDANG INFORMASI DAN DATA	9	1.430	1.950
		PENGOLAH DATA	6	690	1.950
		PENGELOLA SISTEM INFORMASI	6	690	1.950
		PENGELOLA SITUS/ WEB	6	690	1.950
		PRANATA KEARSIPAN	6	690	1.950
		ANALIS SISTEM INFORMASI	7	890	1.950
		KEPALA SUB BIDANG KINERJA DAN PENGHARGAAN	9	1.430	1.950
		PENGOLAH DATA	6	690	1.950
		ANALIS KINERJA	7	890	1.950
		KEPALA BIDANG MUTASI	11	2.045	1.950
		KEPALA SUB BIDANG KEPANGKATAN DAN PEMINDAHAN	9	1.430	1.950

		PENGOLAH DATA	6	690	1.950
		ANALIS JABATAN	7	890	1.950
		KEPALA SUB BIDANG PEMBERHENTIAN DAN PENSIUN	9	1.430	1.950
		PENGOLAH DATA	6	690	1.950
		ANALIS SUMBERDAYA MANUSIA APARATUR	7	890	1.950
		KEPALA SUB BIDANG JABATAN	9	1.430	1.950
		PENGOLAH DATA	6	690	1.950
		ANALIS JABATAN	7	890	1.950
		KEPALA BIDANG PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN	11	2.045	1.950
		KEPALA SUB BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	9	1.430	1.950
		ANALIS DIKLAT	7	890	1.950
		PENGOLAH DATA	6	690	1.950
		PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	1.950
		PRANATA DIKLAT	6	690	1.950
		KEPALA SUB BIDANG PENGEMBANGAN KARIER	9	1.430	1.950
		ANALIS PENGEMBANGAN KARIR	7	890	1.950
		PENGOLAH DATA	6	690	1.950
		KEPALA SUB BIDANG PEMBINAAN	9	1.430	1.950
		PENGOLAH DATA	6	690	1.950
		ANALIS PENEGAKAN INTEGRITAS DAN DISIPLIN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	7	890	1.950
		ANALIS KEPEGAWAIAN AHLI (PERTAMA)	8	1.280	1.950
		ANALIS KEPEGAWAIAN AHLI (MUDA)	9	1.355	1.950
		ANALIS KEPEGAWAIAN AHLI (MADYA)	11	1.930	1.950
		ASSESOR SDM APARATUR AHLI (UTAMA)	13	2.455	1.950
		ASSESOR SDM APARATUR AHLI (MADYA)	11	1.930	1.950
		ASSESOR SDM APARATUR AHLI (MUDA)	9	1.355	1.950
		ASSESOR SDM APARATUR AHLI (PERTAMA)	8	1.280	1.950
5.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN	KEPALA SATUAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN	14	2.865	1.950

SEKRETARIS	12	2.115	1.950
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	8	1.295	1.950
PRANATA KEARSIPAN	6	690	1.950
PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	6	690	1.950
PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	1.950
KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN PELAPORAN	8	1.295	1.950
ANALIS PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN	7	890	1.950
PENGADMINISTRASI PERENCANAAN DAN PROGRAM	5	490	1.950
PENGELOLA DATA	6	690	1.950
KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN	9	1.430	1.950
BENDAHARA	7	890	1.950
PENGADMINISTRASI KEUANGAN	5	490	1.950
KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT	11	2.045	1.950
KEPALA SEKSI SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	8	1.295	1.950
PENGOLAH DATA	6	690	1.950
PRANATA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	6	690	1.950
KEPALA SEKSI PEMADAM KEBAKARAN	8	1.295	1.950
PENGOLAH DATA	6	690	1.950
PENGEMUDI MOBIL PEMADAM KEBAKARAN	3	340	1.950
PRANATA PEMADAM KEBAKARAN	6	690	1.950
KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN SUMBERDAYA APARATUR	11	2.045	1.950
KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR	8	1.295	1.950
PENGOLAH DATA	6	690	1.950
KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN MANAJEMEN INFORMASI PUBLIK	8	1.295	1.950
PENGOLAH DATA	6	690	1.950
KEPALA BIDANG PENEGAKAN PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH	11	2.045	1.950

		KEPALA SEKSI PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENYULUHAN	8	1.295	1.950
		PENGOLAH DATA	6	690	1.950
		KEPALA SEKSI PENYELIDIKAN DAN PENINDAKAN	8	1.295	1.950
		PENGOLAH DATA	6	690	1.950
		KEPALA BIDANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT	11	2.045	1.950
		KEPALA SEKSI KERJASAMA	8	1.295	1.950
		PENGOLAH DATA	6	690	1.950
		PENGOLAH DATA	6	690	1.950
		PETUGAS KEAMANAN	3	340	
		KEPALA SEKSI OPERASIONAL DAN PENGENDALIAN	8	1.295	1.950
		POLISI PAMONG PRAJA PEMULA	5	490	1.950
		POLISI PAMONG PRAJA PELAKSANA	6	740	1.950
6.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	14	2.865	1.950
		SEKRETARIS	11	2.045	1.950
		KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	8	1.295	1.950
		PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	1.950
		PENGOLAH DATA	6	690	1.950
		PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	6	690	1.950
		PRANATA KEARSIPAN	6	690	1.950
		KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN	9	1.430	1.950
		BENDAHARA	7	890	1.950
		PENGADMINISTRASI KEUANGAN	5	490	1.950
		KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN PELAPORAN	8	1.295	1.950
		PENGOLAH DATA	6	690	1.950
		PENGADMINISTRASI PERENCANAAN DAN PROGRAM	5	490	1.950
		ANALIS RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN	7	890	1.950
		KEPALA BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	11	2.045	1.950

KEPALA SEKSI SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	8	1.295	1.950
PENGELOLA DATABASE	6	690	1.950
PENGOLAH DATA	6	690	1.950
KEPALA SEKSI PENGOLAHAN DAN PENYAJIAN DATA KEPENDUDUKAN	8	1.295	1.950
PENGOLAH DATA	6	690	1.950
KEPALA BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK	11	2.045	1.950
KEPALA SEKSI IDENTITAS PENDUDUK	8	1.295	1.950
PENGOLAH DATA	6	690	1.950
PENGADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	5	490	1.950
PRANATA KEARSIPAN	6	690	1.950
KEPALA SEKSI PINDAH DATANG DAN PENDATAAN PENDUDUK	8	1.295	1.950
PENGELOLA SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	6	690	1.950
KEPALA BIDANG PELAYANAN PENCATATAN SIPIL	11	2.045	1.950
KEPALA SEKSI KELAHIRAN DAN KEMATIAN	8	1.295	1.950
PENGOLAH DATA	6	690	1.950
KEPALA SEKSI PERKAWINAN, PERCERAIAN, PERUBAHAN STATUS ANAK DAN KEWARGANEGARAAN	8	1.295	1.950
PENGELOLA KEUANGAN	6	690	1.950
PENGOLAH DATA	6	690	1.950
KEPALA BIDANG PEMANFAATAN DATA DAN INOVASI PELAYANAN	11	2.045	1.950
KEPALA SEKSI KERJASAMA DAN INOVASI PELAYANAN	8	1.295	1.950
PENGOLAH DATA	6	690	1.950
KEPALA SEKSI PEMANFAATAN DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN	8	1.295	1.950
PRANATA KEARSIPAN	6	690	1.950

		PENGELOLA DATA	6	690	1.950
		KEPALA UPT PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KECAMATAN MUNJUNGAN	9	1.430	1.950
		KEPALA UPT PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KECAMATAN PANGGUL	9	1.430	1.950
		KEPALA UPT PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KECAMATAN WATULIMO	9	1.430	1.950
7.	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	14	2.865	1.950
		SEKRETARIS	11	2.045	1.950
		KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	8	1.295	1.950
		PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	1.950
		PENGOLAH DATA	6	690	1.950
		PENGEMUDI	3	340	
		PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	6	690	1.950
		PRANATA KEARSIPAN	6	690	1.950
		KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN, PERENCANAAN DAN PELAPORAN	9	1.430	1.950
		BENDAHARA	7	890	1.950
		PENGADMINISTRASI KEUANGAN	5	490	1.950
		ANALIS RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN	7	890	1.950
		PENGADMINISTRASI PERENCANAAN DAN PROGRAM	5	490	1.950
		KEPALA BIDANG STANDARISASI PENANAMAN MODAL DAN PTSP	11	2.045	1.950
		KEPALA SEKSI PENGADUAN DAN PUBLIKASI PENANAMAN MODAL DAN PTSP	8	1.295	1.950
		PENYUSUN BAHAN PENERAPAN STANDAR WAJIB DAN PENANGANAN PENGADUAN	7	890	1.950
		KEPALA SEKSI STANDARISASI PENANAMAN MODAL DAN PTSP	8	1.295	1.950

		PENYUSUN NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KRITERIA	7	890	1.950
		KEPALA SEKSI PENGOLAHAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL DAN PTSP	9	1.430	1.950
		ANALIS DATA DAN INFORMASI	7	890	1.950
		KEPALA BIDANG PENANAMAN MODAL	11	2.045	1.950
		KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN DAN KERJASAMA PENANAMAN MODAL	8	1.295	1.950
		PENGELOLA DATA PENGEMBANGAN INVESTASI	6	690	1.950
		KEPALA SEKSI PENGENDALIAN DAN PELAPORAN PENANAMAN MODAL	8	1.295	1.950
		PENGADMINISTRASI AKSES PERMODALAN	5	490	1.950
		KEPALA SEKSI PELAYANAN DAN PROMOSI PENANAMAN MODAL	8	1.295	1.950
		PENGELOLA DATA LAYANAN PUBLIK DAN HUBUNGAN INVESTOR	6	690	1.950
		KEPALA BIDANG PERIZINAN	11	2.045	1.950
		KEPALA SEKSI PELAYANAN PERIZINAN USAHA	8	1.295	1.950
		PENGADMINISTRASI PERIZINAN	5	490	1.950
		KEPALA SEKSI PELAYANAN PERIZINAN NON USAHA	9	1.430	1.950
		ANALIS DOKUMEN PERIZINAN	7	890	1.950
		PENGADMINISTRASI PERIZINAN	5	490	1.950
		KEPALA SEKSI VERIFIKASI ADMINISTRASI PERIZINAN	8	1.295	1.950
		PENGADMINISTRASI PERIZINAN	5	490	1.950
		PENGELOLA DOKUMEN PERIZINAN	6	690	1.950
		PRANATA KEARSIPAN	6	690	1.950
III	KATEGORI 3				
	1. DINAS PERIKANAN	KEPALA DINAS PERIKANAN	14	2.865	1900
		SEKRETARIS	11	2.045	1.900
		KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN	8	1.295	1.900

KEPEGAWAIAN			
PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	5	490	1.900
PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	6	690	1.900
PENGEMUDI	3	340	
PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	1.900
KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN, PERENCANAAN DAN PELAPORAN	9	1.430	1.900
PENGELOLA DATA	6	690	1.900
PENGADMINISTRASI KEUANGAN	5	490	1.900
BENDAHARA	7	890	1.900
PENGADMINISTRASI ANGGARAN	5	490	1.900
ANALIS RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN	7	890	1.900
PENGADMINISTRASI PERENCANAAN DAN PROGRAM	5	490	1.900
KEPALA BIDANG PENGELOLAAN HASIL PERIKANAN	11	2.045	1.900
KEPALA SEKSI PENGELOLAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN DAN PEMASARAN	9	1.430	1.900
ANALIS PASAR	7	890	1.900
PENGELOLA PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN USAHA	6	690	1.900
PENGOLAH DATA	6	690	1.900
KEPALA SEKSI BINA MUTU DAN DIVERSIFIKASI PRODUK	9	1.430	1.900
PENGELOLA TEKNOLOGI PASCAPANEN	6	690	1.900
ANALIS MUTU HASIL PERIKANAN	7	890	1.900
PENGOLAH DATA	6	690	1.900
PENGELOLA PELAKSANAAN PENGUJIAN MUTU SECARA LABORATORIS TERHADAP PRODUK HASIL PERIKANAN	6	690	1.900
KEPALA BIDANG PERIKANAN BUDIDAYA	11	2.045	1.900
KEPALA SEKSI PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA	8	1.295	1.900

PENGELOLA PENGAWASAN PEMBUDIDAYAAN IKAN	6	690	1.900
PENYUSUN RENCANA BAHAN TEKNIS PRASARANA DAN SARANA BUDIDAYA	7	890	1.900
ANALIS BUDIDAYA PERIKANAN	7	890	1.900
ANALIS PERIKANAN BUDIDAYA	7	890	1.900
ANALIS STANDARDISASI BUDIDAYA	7	890	1.900
KEPALA SEKSI PERBENIHAN, KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN	9	1.430	1.900
PENGELOLA STATISTIK PERIKANAN	6	690	1.900
PENYUSUN RENCANA BAHAN TEKNIS KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN	7	890	1.900
ANALIS POTENSI PERBENIHAN	7	890	1.900
ANALIS KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN	7	890	1.900
ANALIS BENIH	7	890	1.900
KEPALA BIDANG PERIKANAN TANGKAP	11	2.045	1.900
KEPALA SEKSI EKSPLOITASI DAN TEKNOLOGI PENANGKAPAN IKAN	9	1.430	1.900
PENGELOLA STATISTIK PERIKANAN	6	690	1.900
ANALIS PENDAFTARAN KAPAL PERIKANAN	7	890	1.900
ANALIS KENELAYANAN	7	890	1.900
ANALIS ALAT PENANGKAP IKAN DAN ALAT BANTU PENANGKAPAN IKAN	7	890	1.900
ANALIS PENGELOLAAN SUMBER DAYA IKAN	7	890	1.900
KEPALA SEKSI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PERIKANAN	8	1.295	1.900
PENGADMINISTRASI KEUANGAN	5	490	1.900
PENGELOLA PENGAWASAN PENANGKAPAN IKAN	6	690	1.900

		PENGAWAS PEMANFAATAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	7	890	1.900
		PENYUSUN RENCANA PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN JENIS IKAN	7	890	1.900
		ANALIS KONSERVASI DAN REHABILITASI WILAYAH PESISIR	7	890	1.900
		KEPALA UPTD TEMPAT PELELANGAN IKAN	9	1.430	1.900
		TEKNISI KONSERVASI	5	490	1.900
		PENGELOLA JASA PANGKALAN PENDARATAN IKAN	6	690	1.900
		PENGELOLA PENGAWASAN PENANGKAPAN IKAN	6	690	1.900
2.	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	14	2.865	1.900
		SEKRETARIS	11	2.045	1.900
		KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN PELAPORAN	9	1.430	1.900
		ANALIS PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN	7	890	1.900
		PENGADMINISTRASI PERENCANAAN DAN PROGRAM	5	490	1.900
		KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN	9	1.430	1.900
		BENDAHARA	7	890	1.900
		PENGADMINISTRASI KEUANGAN	5	490	1.900
		KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	8	1295	1.900
		PENGOLAH DATA	6	690	1.900
		PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	5	490	1.900
		PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	1.900
		PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	6	690	1.900
		PRAMU BAKTI	1	190	
		PRANATA KEARSIPAN	6	690	1.900
		PENGADMINISTRASI KARCIS	5	490	1.900
		KEPALA BIDANG DESTINASI PARIWISATA	11	2.045	1.900

KEPALA SEKSI DESTINASI WISATA ALAM	8	1.295	1.900
PENGOLAH DATA	6	690	1.900
KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN TATA KELOLA DESTINASI	8	1.295	1.900
PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	1.900
KEPALA SEKSI DESTINASI WISATA BUDAYA DAN BUATAN	8	1.295	1.900
PENGOLAH DATA	6	690	1.900
KOORDINATOR	7	890	1.900
PETUGAS KEAMANAN	3	340	
JURU PUNGUT RETRIBUSI	3	340	
PRAMU KEBERSIHAN	1	190	
PRAMU BAKTI	1	190	
PEMANDU WISATA	5	490	1.900
KEPALA BIDANG PEMASARAN	11	2.045	1.900
KEPALA SEKSI PENDATAAN DAN PENGEMBANGAN PASAR	8	1.295	1.900
PENGELOLA PEMASARAN	6	690	1.900
KEPALA SEKSI SARANA PROMOSI DAN INFORMASI PARIWISATA	8	1.295	1.900
PENGELOLA PROMOSI DAN INFORMASI WISATA	6	690	1.900
KEPALA SEKSI PROMOSI DAN KERJASAMA	8	1.295	1.900
PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	1.900
KEPALA BIDANG INDUSTRI PARIWISATA	11	2.045	1.900
KEPALA SEKSI USAHA SARANA PARIWISATA	8	1.295	1.900
PENGOLAH DATA	6	690	1.900
KEPALA SEKSI USAHA JASA PARIWISATA	8	1.295	1.900
PENGOLAH DATA	6	690	1.900
KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN SDM KEPARIWISATAAN	8	1.295	1.900
PENGOLAH DATA	6	690	1.900
KEPALA BIDANG KEBUDAYAAN	11	2.045	1.900
KEPALA SEKSI PELESTARIAN TRADISI, SEJARAH DAN CAGAR BUDAYA	8	1.295	1.900

		PENYUSUN PROGRAM PENULISAN SEJARAH DAN NILAI BUDAYA	7	890	1.900
		KEPALA SEKSI PEMBINAAN DAN KELEMBAGAAN SENI BUDAYA	8	1.295	1.900
		PENGADMINISTRASI KESENIAN DAN BUDAYA DAERAH	5	490	1.900
		KEPALA SEKSI PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN KESENIAN	8	1.295	1.900
		PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	1.900
		KEPALA UPT DESTINASI WISATA TERPADU	9	1.430	1.900
		PETUGAS KEAMANAN	3	340	
		JURU PUNGUT RETRIBUSI	3	340	
		PEMANDU WISATA	5	490	1.900
		KOORDINATOR	7	890	1.900
		PRAMU KEBERSIHAN	1	190	
		PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	1.900
		PENGOLAH MAKANAN	6	690	1.900
		PRANATA JAMUAN	6	690	1.900
		PETUGAS KEAMANAN	3	340	
3.	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	14	2.865	1.900
		SEKRETARIS	11	2.045	1.900
		KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	8	1.295	1.900
		PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	6	690	1.900
		PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	1.900
		PENGOLAH DATA	6	690	1.900
		PRAMU BAKTI	1	190	
		PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	5	490	1.900
		KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN, PERENCANAAN, DAN PELAPORAN	9	1.430	1.900
		BENDAHARA	7	890	1.900
		PENGADMINISTRASI KEUANGAN	5	490	1.900
		PENGADMINISTRASI PERENCANAAN DAN PROGRAM	5	490	1.900
		PENGOLAH DATA	6	690	1.900

ANALIS PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN	7	890	1.900
ANALIS PERENCANAAN	7	890	1.900
KEPALA BIDANG PERENCANAAN TEKNIS	11	2.045	1.900
KEPALA SEKSI PERENCANAAN TEKNIS JALAN DAN JEMBATAN	8	1.295	1.900
PENGOLAH DATA	6	690	1.900
PENGELOLA DATA	6	690	1.900
ANALIS JALAN JEMBATAN	7	890	1.900
ANALIS TEKNIK DAN MATERI	7	890	1.900
PENGAWAS JALAN DAN JEMBATAN	7	890	1.900
KEPALA SEKSI PERENCANAAN TEKNIS BANGUNAN AIR	8	1.295	1.900
PENGOLAH DATA	6	690	1.900
PENGELOLA PERENCANAAN TEKNIS TATA BANGUNAN	6	690	1.900
PENGOLAH SARANA DAN PRASARANA PENGAIRAN	6	690	1.900
KEPALA SEKSI PERENCANAAN TEKNIS BANGUNAN GEDUNG	8	1.295	1.900
PENGELOLA PERENCANAAN TEKNIS TATA BANGUNAN	6	690	1.900
PENGOLAH DATA	6	690	1.900
PENGELOLA DATA	6	690	1.900
PENGAWAS BANGUNAN DAN GEDUNG	7	890	1.900
KEPALA BIDANG BINA MARGA	11	2.045	1.900
KEPALA SEKSI PEMBANGUNAN JALAN	8	1.295	1.900
PENGOLAH DATA	6	690	1.900
PENGELOLA PEMBANGUNAN DAN PENINGKATAN JALAN	6	690	1.900
PENILIK JALAN	6	690	1.900
ANALIS JALAN JEMBATAN	7	890	1.900
KEPALA SEKSI PEMBANGUNAN JEMBATAN	9	1.430	1.900
PENGOLAH DATA	6	690	1.900
ANALIS JALAN JEMBATAN	7	890	1.900
PEMERIKSA JALAN DAN JEMBATAN	7	890	1.900
KEPALA SEKSI PRESERVASI JALAN DAN JEMBATAN	8	1.295	1.900
PENGOLAH DATA	6	690	1.900

PEMELIHARA JALAN	3	340	
PENGELOLA PEMBANGUNAN DAN PENINGKATAN JALAN	6	690	1.900
PENGAWAS PENGOPERASIAN ALAT BERAT	7	890	1.900
PENGADMINISTRASI KEUANGAN	5	490	1.900
OPERATOR ALAT BERAT	5	490	1.900
PEMERIKSA JALAN DAN JEMBATAN	7	890	1.900
PENGELOLA PEMELIHARAAN JALAN	6	690	1.900
KEPALA BIDANG SUMBER DAYA AIR DAN JASA KONSTRUKSI	11	2.045	1.900
KEPALA SEKSI KONSERVASI SDA DAN PENGEMBANGAN IRIGASI	9	1.430	1.900
PENGOLAH DATA	6	690	1.900
ANALIS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	7	890	1.900
ANALIS SUMBER DAYA AIR	7	890	1.900
PENGAMAT OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR	7	890	1.900
PENGELOLA PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI	6	690	1.900
KEPALA SEKSI BINA MANFAAT DAN JASA KONSTRUKSI	8	1.295	1.900
PENGOLAH DATA	6	690	1.900
PENGELOLA SUMBER DAYA AIR	6	690	1.900
PENGELOLA TEKNIK KONSTRUKSI BERKELANJUTAN	6	690	1.900
ANALIS BANGUNAN GEDUNG DAN PERMUKIMAN	7	890	1.900
PENATA BANGUNAN GEDUNG DAN PERMUKIMAN	7	890	1.900
KEPALA SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN IRIGASI	8	1.295	1.900
PENGELOLA PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI	6	690	1.900
PENGOLAH SARANA DAN PRASARANA PENGAIRAN	6	690	1.900

PENJAGA PINTU AIR	2	290	
KEPALA BIDANG PERTANAHAN	11	2.045	1.900
KEPALA SEKSI PENATAGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH	8	1.295	1.900
PENGOLAH DATA	6	690	1.900
PENGELOLA DATA	6	690	1.900
ANALIS PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH	7	890	1.900
PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	1.900
KEPALA SEKSI INVENTARISASI, PENGUASAAN TANAH DAN PENGEMBANGAN WILAYAH	8	1.295	1.900
PENGOLAH DATA	6	690	1.900
PENGELOLA DATA	6	690	1.900
ANALIS PENGATURAN DAN PENGADAAN TANAH	7	890	1.900
PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	1.900
KEPALA SEKSI PERMASALAHAN PERTANAHAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN	9	1.430	1.900
ANALIS KONFLIK PERTANAHAN	7	890	1.900
PENGELOLA DATA FASILITASI PENYELESAIAN PERMASALAHAN PERTANAHAN	6	690	1.900
KEPALA BIDANG PENATAAN RUANG DAN BANGUNAN	11	2.045	1.900
KEPALA SEKSI PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN GEDUNG	8	1.295	1.900
PENGAWAS BANGUNAN DAN GEDUNG	7	890	1.900
ANALIS BANGUNAN DAN PERUMAHAN	7	890	1.900
PENATA BANGUNAN GEDUNG DAN PERMUKIMAN	7	890	1.900
PENGOLAH DATA	6	690	1.900
PENGUJI LABORATORIUM TANAH, ASPAL DAN BETON	7	890	1.900
KEPALA SEKSI PERENCANAAN TATA RUANG	8	1.295	1.900

		PENGELOLA TATA RUANG	6	690	1.900
		ANALIS TATA RUANG	7	890	1.900
		PENYUSUN RENCANA TATA RUANG	7	890	1.900
		PENGOLAH DATA	6	690	1.900
		PENGELOLA DATA	6	690	1.900
		KEPALA SEKSI PENGENDALIAN TATA RUANG DAN TATA BANGUNAN	8	1.295	1.900
		PENGELOLA PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG	6	690	1.900
		PENGELOLA TATA RUANG DAN TATA GUNA BANGUNAN	6	690	1.900
		ANALIS TATA RUANG	7	890	1.900
		PENGOLAH DATA	6	690	1.900
		KEPALA UPT LABORATORIUM KONSTRUKSI	9	1.430	1.900
		PENGUJI BAHAN LABORATORIUM	7	890	1.900
		PENGELOLA DATA BAHAN DAN KONTROKSI	6	690	1.900
		PENGUJI BAHAN DAN KONTRUKSI	7	890	1.900
		TEKNIK TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN AHLI PERTAMA	7	890	1.900
		TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN AHLI PERTAMA	7	890	1.900
		PENGUJI LABORATORIUM TANAH, ASPAL DAN BETON	7	890	1.900
		TEKNIK PENGAIRAN AHLI PERTAMA	7	890	1.900
		PENATA RUANG AHLI PERTAMA	7	890	1.900
4.	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN & LINGKUNGAN HIDUP	14	2.865	1.900
		SEKRETARIS	11	2.045	1.900
		KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN PELAPORAN	9	1.430	1.900
		ANALIS PERENCANAAN	7	890	1.900
		ANALIS PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN	7	890	1.900
		PENGADMINISTRASI PERENCANAAN DAN PROGRAM	5	490	1.900
		KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN	8	1.295	1.900

KEPEGAWAIAN			
PRANATA KEARSIPAN	6	690	1.900
PETUGAS KEAMANAN	3	340	
PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	1.900
PENGEMUDI	3	340	
PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	6	690	1.900
PENGOLAH DATA	6	690	1.900
PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	5	490	1.900
PRAMU BAKTI	1	190	
KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN	9	1.430	1.900
BENDAHARA	7	890	1.900
PENGADMINISTRASI KEUANGAN	5	490	1.900
KEPALA BIDANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	11	2.045	1.900
KEPALA SEKSI PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH	8	1.295	1.900
JURU SURVEY PERMUKIMAN PERUMAHAN	5	490	1.900
ANALIS PERENCANAAN WILAYAH PERUMAHAN	7	890	1.900
KEPALA SEKSI PERMUKIMAN	8	1.295	1.900
PENGAWAS FISIK PEMUKIMAN	7	890	1.900
PENGELOLA DATA	6	690	1.900
KEPALA SEKSI PERUMAHAN	8	1.295	1.900
PENGAWAS FISIK PEMUKIMAN	7	890	1.900
ANALIS PERUMAHAN	7	890	1.900
KEPALA BIDANG AIR MINUM DAN SANITASI PERMUKIMAN	11	2.045	1.900
KEPALA SEKSI PERENCANAAN TEKNIS DAN PENGENDALIAN	9	1.430	1.900
ANALIS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	7	890	1.900
TEKNISI KECIPTAKARYAAN	5	490	1.900

KEPALA SEKSI AIR LIMBAH DOMESTIK DAN DRAINASE	9	1.430	1.900
ANALIS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	7	890	1.900
TEKNISI KECIPTAKARYAAN	5	490	1.900
KEPALA SEKSI PENYELENGGARAAN SANITASI PENYEDIAAN AIR MINUM	8	1.295	1.900
PEMELIHARA SARANA DAN PRASARANA	3	340	
TEKNISI AIR	5	490	1.900
TEKNISI KECIPTAKARYAAN	5	490	1.900
KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN	11	2.045	1.900
KEPALA SEKSI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN	8	1.295	1.900
PENELAAH DAMPAK LINGKUNGAN	7	890	1.900
PENGOLAH DATA LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEGIATAN	6	690	1.900
PENGAWAS KESELATANAN DAN KESEHATAN KERJA DAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN	7	890	1.900
KEPALA SEKSI PEMELIHARAAN DAN PEMULIHAN LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM	8	1.295	1.900
PENYULUH LINGKUNGAN HIDUP	7	890	1.900
PENGELOLA LINGKUNGAN	6	690	1.900
PENGOLAH DATA LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEGIATAN	6	690	1.900
KEPALA SEKSI PERENCANAAN DAN PENGAJIAN LINGKUNGAN	8	1.295	1.900
PENGADMINISTRASI PERIZINAN	5	490	1.900
ANALIS LINGKUNGAN	7	890	1.900

		HIDUP			
		PENGELOLA INFORMASI LINGKUNGAN	6	690	1.900
		PENGOLAH DATA LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEGIATAN	6	690	1.900
		KEPALA BIDANG KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN	11	2.045	1.900
		KEPALA SEKSI PENGELOLAAN SAMPAH	8	1.295	1.900
		PENGELOLA KENDARAAN DAN PERJALANAN DINAS	6	690	1.900
		PRAMU KEBERSIHAN	1	190	
		KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN SISTEM	8	1.295	1.900
		PENGOLAH DATA LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEGIATAN	6	690	1.900
		PENGOLAH DATA	6	690	1.900
		KEPALA SEKSI PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU	8	1.295	1.900
		PENGELOLA SARANA PEMBIBITAN DAN PENGHIJAUAN	6	690	1.900
		PRANATA TAMAN	6	690	1.900
		PRAMU TAMAN	1	190	
		SANITARIAN PERTAMA	8	1.280	1.900
		KEPALA UPT TEMPAT PEMROSESAN AKHIR SAMPAH	9	1.430	1.900
		PENGELOLA SAMPAH	6	690	1.900
		PENGELOLA LIMBAH	6	690	1.900
		TEKNIK PENGAIRAN AHLI PERTAMA	7	890	1.900
5.	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	14	2.865	1.900
		SEKRETARIS	11	2.045	1.900
		KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN PELAPORAN	9	1.430	1.900
		ANALIS RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN	7	890	1.900
		PENGADMINISTRASI PERENCANAAN DAN PROGRAM	5	490	1.900
		KEPALA SUB BAGIAN	9	1.430	1.900

KEUANGAN			
BENDAHARA	7	890	1.900
PENGADMINISTRASI KEUANGAN	5	490	1.900
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	8	1.295	1.900
PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	1.900
PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	6	690	1.900
PRAMU BAKTI	1	190	
PRANATA KEARSIPAN	6	690	1.900
PENGOLAH DATA	6	690	1.900
KEPALA BIDANG PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL	11	2.045	1.900
KEPALA SEKSI PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL ANAK DAN LANJUT USIA	8	1.295	1.900
PENGELOLA BIMBINGAN DAN KONSELING	6	690	1.900
PENGELOLA PELAYANAN REHABILITASI SOSIAL DAN LANSIA	6	690	1.900
KEPALA SEKSI PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL TUNA SOSIAL	8	1.295	1.900
PENGELOLA REHABILITASI DAN PELAYANAN SOSIAL	6	690	1.900
PENGADMINISTRASI REHABILITASI MASALAH SOSIAL	5	490	1.900
KEPALA SEKSI PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL DISABILITAS	8	1.295	1.900
PENGADMINISTRASI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG CACAT	5	490	1.900
PENGELOLA BANTUAN SOSIAL DAN HIBAH	6	690	1.900
KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	11	2.045	1.900
KEPALA SEKSI PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA	8	1.295	1.900
ANALIS PELAYANAN SOSIAL	7	890	1.900
PENGELOLA DATA BANTUAN SOSIAL	6	690	1.900

KEPALA SEKSI PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	9	1.430	1.900
ANALIS MASALAH SOSIAL	7	890	1.900
PENGELOLA PERLINDUNGAN SOSIAL	6	690	1.900
KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	11	2.045	1.900
KEPALA SEKSI PENGUATAN KELUARGA	8	1.295	1.900
PENYULUH PENINGKATAN KUALITAS HIDUP PEREMPUAN DAN ANAK	7	890	1.900
PENGELOLA PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	6	690	1.900
KEPALA SEKSI PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	9	1.430	1.900
PENGAWAS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK	7	890	1.900
ANALIS PERLINDUNGAN PEREMPUAN	7	890	1.900
KEPALA SEKSI PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMENUHAN HAK ANAK	9	1.430	1.900
ANALIS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK	7	890	1.900
PENGELOLA PENGUATAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	6	690	1.900
KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN SOSIAL	11	2.045	1.900
KEPALA SEKSI PENANGANAN FAKIR MISKIN	8	1.295	1.900
PENGELOLA BIMBINGAN SOSIAL	6	690	1.900
KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN SOSIAL MASYARAKAT	8	1.295	1.900
ANALIS PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENANGANAN MASALAH SOSIAL	7	890	1.900
PENGELOLA PEMBERDAYAAN LEMBAGA SOSIAL	6	690	1.900

		KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN RESTORASI SOSIAL	8	1.295	1.900
		PENGELOLA KESEJAHTERAAN SOSIAL	6	690	1.900
6.	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	14	2.865	1.900
		SEKRETARIS	11	2.045	1.900
		KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN, PERENCANAAN DAN PELAPORAN	9	1.430	1.900
		BENDAHARA	7	890	1.900
		PENGADMINISTRASI KEUANGAN	5	490	1.900
		PENGOLAH DATA	6	690	1.900
		KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	8	1.295	1.900
		ANALIS RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN	7	890	1.900
		PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	1.900
		PENGADMINISTRASI PERENCANAAN DAN PROGRAM	5	490	1.900
		PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	6	690	1.900
		PENGOLAH DATA	6	690	1.900
		PENGELOLA BANGUNAN GEDUNG	6	690	1.900
		KEPALA BIDANG HUBUNGAN INDUSTRIAL	11	2.045	1.900
		KEPALA SEKSI SYARAT KERJA	8	1.295	1.900
		PENGOLAH DATA	6	690	1.900
		PENGADMINISTRASI KEUANGAN	5	490	1.900
		KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN DAN JAMSOSTEK	8	1.295	1.900
		PENGOLAH DATA	6	690	1.900
		PENGADMINISTRASI KEUANGAN	5	490	1.900
		KEPALA SEKSI PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL	8	1.295	1.900
		PENGOLAH DATA	6	690	1.900
		PENGADMINISTRASI	5	490	1.900

KEUANGAN			
KEPALA BIDANG PERINDUSTRIAN	11	2.045	1.900
KEPALA SEKSI INDUSTRI NON AGRO	8	1.295	1.900
PENGOLAH DATA	6	690	1.900
PENGADMINISTRASI KEUANGAN	5	490	1.900
KEPALA SEKSI STANDARISASI DAN DESAIN PRODUK INDUSTRI	9	1.430	1.900
ANALIS TEKNOLOGI INDUSTRI	7	890	1.900
PENGADMINISTRASI KEUANGAN	5	490	1.900
KEPALA SEKSI INDUSTRI AGRO	9	1.430	1.900
ANALIS PENGEMBANGAN USAHA AGRO INDUSTRI	7	890	1.900
PENGADMINISTRASI KEUANGAN	5	490	1.900
KEPALA BIDANG PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	11	2.045	1.900
KEPALA SEKSI PENEMPATAN DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA	8	1.295	1.900
PENGOLAH DATA	6	690	1.900
PENGADMINISTRASI KEUANGAN	5	490	1.900
KEPALA SEKSI PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	8	1.295	1.900
PENGOLAH DATA	6	690	1.900
PENGADMINISTRASI KEUANGAN	5	490	1.900
KEPALA SEKSI TRANSMIGRASI	8	1.295	1.900
PENGOLAH DATA	6	690	1.900
PENGADMINISTRASI KEUANGAN	5	490	1.900
MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL AHLI (PERTAMA)	8	1.280	1.900
PENGANTAR KERJA AHLI (MUDA)	9	1.355	1.900
PENGANTAR KERJA AHLI (PERTAMA)	8	1.280	1.900
INSTRUKTUR AHLI (MADYA)	11	1.930	1.900
INSTRUKTUR AHLI (MUDA)	9	1.355	1.900

		INSTRUKTUR AHLI (PERTAMA)	8	1.280	1.900
		PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN AHLI (MUDA)	9	1.355	1.900
		PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN AHLI (PERTAMA)	8	1.280	1.900
7.	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	14	2.865	1.900
		SEKRETARIS	11	2.045	1.900
		KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN EVALUASI	9	1.430	1.900
		PENGOLAH DATA	6	690	1.900
		ANALIS RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN	7	890	1.900
		KOORDINATOR KEBUN PERCOBAAN	7	890	1.900
		ANALIS LABORATORIUM TUMBUHAN DAN SARANA	7	890	1.900
		PENGELOLA INSTALASI KEBUN/ LAHAN PRAKTEK DAN SCREEN HOUSE	6	690	1.900
		PENGELOLA KANDANG HEWAN PERCOBAAN	6	690	1.900
		PENGELOLA KEBUTUHAN BIBIT TANAMAN PADI, BUAH-BUAHAN SERTA SAYURAN	6	690	1.900
		PENGELOLA LAHAN PERTANIAN	6	690	1.900
		PENGADMINISTRASI PERENCANAAN DAN PROGRAM	5	490	1.900
		PENGELOLA BAHAN PERENCANAAN DAN PELAPORAN USAHA TANI	6	690	1.900
		PENGELOLA PETERNAKAN	6	690	1.900
		KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET	9	1.430	1.900
		BENDAHARA	7	890	1.900
		PENGADMINISTRASI KEUANGAN	5	490	1.900
		PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	6	690	1.900
		KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	8	1.295	1.900

PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	1.900
PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	5	490	1.900
PENGOLAH DATA	6	690	1.900
PETUGAS KEAMANAN	3	340	
PRAMU BAKTI	1	190	
PRANATA KEARSIPAN	6	690	1.900
KEPALA BIDANG KESEHATAN HEWAN DAN KESMAVET	11	2.045	1.900
KEPALA SEKSI PENCEGAHAN, PEMBERANTASAN PENYAKIT HEWAN DAN PELAYANAN MEDIKVETERINER	8	1.295	1.900
PENGOLAH DATA	6	690	1.900
PENGELOLA KESEHATAN TERNAK BESAR, KECIL DAN UNGGAS	6	690	1.900
PELATIH / PAWANG HEWAN	5	490	1.900
KEPALA SEKSI KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	8	1.295	1.900
PENGOLAH DATA	6	690	1.900
PENGAWAS HYGIENE, SANITASI USAHA PETERNAKAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	7	890	1.900
PENGAWAS LALU LINTAS HEWAN DAN WILAYAH KARANTINA HEWAN	7	890	1.900
PENGELOLA KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	6	690	1.900
KEPALA SEKSI PENGAMATAN PENYAKIT HEWAN DAN PENGAWASAN OBAT HEWAN	8	1.295	1.900
PENGOLAH DATA	6	690	1.900
PENGAWAS PENYAKIT DAN PENGENDALI PENYAKIT HEWAN	7	890	1.900
PENGAWAS PENYAKIT DAN PENGENDALI PENYAKIT IKAN	7	890	1.900
PENGELOLA LABORATORIUM	6	690	1.900

KEPALA BIDANG KETAHANAN PANGAN	11	2.045	1.900
KEPALA SEKSI KETERSEDIAAN DAN KERAWANAN PANGAN	9	1.430	1.900
ANALIS PANGAN	7	890	1.900
PENGELOLA KETERSEDIAAN DAN KERAWANAN PANGAN	6	690	1.900
KEPALA SEKSI DISTRIBUSI DAN CADANGAN PANGAN	9	1.430	1.900
ANALIS PANGAN	7	890	1.900
PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	1.900
PENGELOLA KETAHANAN PANGAN	6	690	1.900
KEPALA SEKSI KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN	9	1.430	1.900
ANALIS PANGAN	7	890	1.900
PENGELOLA PENGANEKARAGAMAN PANGAN	6	690	1.900
PENGELOLA POLA PANGAN HARAPAN	6	690	1.900
KEPALA BIDANG TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	11	2.045	1.900
KEPALA SEKSI TANAMAN PANGAN	9	1.430	1.900
PENGOLAH DATA	6	690	1.900
PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	1.900
ANALIS POTENSI BUDIDAYA ANEKA KACANG DAN UMBI	7	890	1.900
ANALIS POTENSI BUDIDAYA SEREALIA	7	890	1.900
PENGELOLA BUDIDAYA DAN PENGEMBANGAN TANAMAN PANGAN	6	690	1.900
ANALIS PENINGKATAN USAHA PERTANIAN DAN AGROBISNIS	7	890	1.900
KEPALA SEKSI TANAMAN HORTIKULTURA	8	1.295	1.900
PENGOLAH DATA	6	690	1.900
PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	1.900
PENGELOLA TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	6	690	1.900

PENGELOLA DAN KEBUTUHAN BIBIT TANAMAN PADI, BUAH-BUAHAN SERTA SAYURAN	6	690	1.900
KEPALA SEKSI BINA USAHA TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	9	1.430	1.900
ANALIS PEMBIAYAAN PERTANIAN	7	890	1.900
PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	1.900
ANALIS PENGOLAH HASIL PERTANIAN	7	890	1.900
KEPALA BIDANG BINA PRODUKSI DAN BINA USAHA PETERNAKAN	11	2.045	1.900
KEPALA SEKSI BUDIDAYA DAN PEMBIBITAN TERNAK	8	1.295	1.900
PENGAWAS MUTU BIBIT TERNAK	7	890	1.900
PENGELOLA BUDIDAYA PENGEMBANGAN TERNAK DAN HEWAN LAINNYA	6	690	1.900
PENGELOLA INSTALASI TERNAK	6	690	1.900
PENGELOLA DISTRIBUSI TERNAK GADUHAN DAN SEMI GADUHAN	6	690	1.900
PENGOLAH DATA	6	690	1.900
KEPALA SEKSI PAKAN DAN TEKNOLOGI PETERNAKAN	9	1.430	1.900
PENGOLAH DATA	6	690	1.900
ANALIS PAKAN TERNAK	7	890	1.900
PENGAWAS MUTU PAKAN DAN PRODUKSI BIBIT TERNAK BESAR	7	890	1.900
KEPALA SEKSI BINA USAHA PETERNAKAN	8	1.295	1.900
PENGOLAH DATA	6	690	1.900
PENGELOLA LALU LINTAS TERNAK/ PENGURUS IZIN BUDI DAYA TERNAK	6	690	1.900
PENGELOLA USAHA TANI PETERNAKAN DAN KEHEWANAN	6	690	1.900
PENYUSUN RENCANA MANAJEMEN MUTU PASCA PANEN	7	890	1.900
KEPALA BIDANG PERKEBUNAN	11	2.045	1.900
KEPALA SEKSI TANAMAN SEMUSIM	9	1.430	1.900
PENGADMINISTRASI	5	490	1.900

UMUM			
PENGOLAH DATA	6	690	1.900
ANALIS PENGELOLA DATA KOMODITAS PERKEBUNAN	7	890	1.900
PENGELOLA PASCA PANEN	6	690	1.900
PENYUSUN TEKNIS USAHA BUDIDAYA	7	890	1.900
KEPALA SEKSI TANAMAN TAHUNAN	9	1.430	1.900
PENGOLAH DATA	6	690	1.900
ANALIS PENGELOLA DATA KOMODITAS PERKEBUNAN	7	890	1.900
PENGELOLA PEKARYA KEBUN	6	690	1.900
PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	1.900
PENGELOLA PASCA PANEN	6	690	1.900
PENYUSUN TEKNIS USAHA BUDIDAYA	7	890	1.900
KEPALA SEKSI BINA USAHA PERKEBUNAN	9	1.430	1.900
PENGOLAH DATA	6	690	1.900
PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	1.900
PENGELOLA PERLINDUNGAN TANAMAN DAN PENGELOLAAN HASIL PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN	6	690	1.900
PENGELOLA PERENCANAAN DAN PELAPORAN USAHA TANI	6	690	1.900
ANALIS PENGELOLA DATA KOMODITAS PERKEBUNAN	7	890	1.900
ANALIS PEMASARAN HASIL PERTANIAN	7	890	1.900
KEPALA BIDANG PRASARANA, SARANA DAN PENYULUHAN	11	2.045	1.900
KEPALA SEKSI PENYULUHAN	9	1.430	1.900
ANALIS PROGRAM PENYULUHAN	7	890	1.900
PENGOLAH DATA	6	690	1.900
PENGELOLA BAHAN DATABASE KELEMBAGAAN PETANI	6	690	1.900

PENGELOLA ADMINISTRASI SISTEM INFORMASI PENYULUH PERTANIAN	6	690	1.900
KEPALA SEKSI SARANA	8	1.295	1.900
PENGELOLA ALAT DAN MESIN PERTANIAN	6	690	1.900
PENGOLAH DATA	6	690	1.900
PENGAWAS PUPUK DAN PESTISIDA	7	890	1.900
ANALIS ALAT DAN MESIN PERTANIAN	7	890	1.900
KEPALA SEKSI PRASARANA	9	1.430	1.900
ANALIS TANAH PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN	7	890	1.900
PENGOLAH DATA	6	690	1.900
PENGELOLA TATA GUNA LAHAN, AIR, SARANA DAN PRASARANA PERTANIAN	6	690	1.900
ANALIS PASAR HASIL PERTANIAN AHLI (PERTAMA)	8	1.280	1.900
PENYULUH PERTANIAN AHLI (MADYA)	11	1.930	1.900
PENYULUH PERTANIAN AHLI (MUDA)	9	1.355	1.900
PENYULUH PERTANIAN AHLI (PERTAMA)	8	1.280	1.900
PENYULUH PERTANIAN TERAMPIL (PELAKSANA)	6	740	1.900
PENYULUH PERTANIAN TERAMPIL (PELAKSANA LANJUTAN)	7	955	1.900
PENYULUH PERTANIAN PELAKSANA PEMULA	5	490	1.900
KEPALA UPT PEMBIBITAN TERNAK DAN RUMAH PEMOTONGAN HEWAN	9	1.430	1.900
PENGOLAH DATA	6	690	1.900
PERAWAT TERNAK	6	740	1.900
PENGELOLA BUDIDAYA PENGEMBANGAN TERNAK DAN HEWAN LAINNYA	6	690	1.900
PENGELOLA INSTALASI KEBUN/ LAHAN PRAKTEK DAN SCREEN HOUSE	6	690	1.900

		PENGELOLA RUMAH POTONG HEWAN	6	690	1.900
		PENGELOLA USAHA PEMOTONGAN TERNAK/ UNGGAS DAN LALU LINTAS DAGING	6	690	1.900
		KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA	8	1.295	1.900
		KEPALA UPT TAMAN SAINS TEKNOLOGI PERTANIAN	9	1.430	1.900
		KOORDINATOR KEBUN PERCOBAAN	7	890	1.900
		PENGELOLA PERLINDUNGAN TANAMAN DAN PENGELOLAAN HASIL PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN	6	690	1.900
		PENGELOLA USAHA TANI PETERNAKAN DAN KEHEWANAN	6	690	1.900
		PENGELOLA PASCA PANEN	6	690	1.900
		ANALIS PEMASARAN DAN KERJASAMA	7	890	1.900
		PENGELOLA KEBUN KOPI PERKEBUNAN	6	690	1.900
		PENGELOLA LAHAN PERTANIAN	6	690	1.900
		PENGELOLA PERENCANAAN DAN PELAPORAN USAHA TANI	6	690	1.900
		PENGELOLA TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN	6	690	1.900
		KEPALA UPT PUSAT KESEHATAN HEWAN	9	1.430	1.900
		PENGAWAS PENYAKIT DAN PENGENDALI PENYAKIT HEWAN	7	890	1.900
		PENGELOLA KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	6	690	1.900
8.	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	14	2.865	1.900
		SEKRETARIS	11	2.045	1.900
		KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	8	1.295	1.900

PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	5	490	1.900
PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	1.900
PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	6	690	1.900
PRANATA KEARSIPAN	6	690	1.900
PENGOLAH DATA	6	690	1.900
PENGEMUDI	3	340	
PRAMU BAKTI	1	190	
KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN, PERENCANAAN DAN PELAPORAN	9	1.430	1.900
PENGADMINISTRASI PERENCANAAN DAN PROGRAM	5	490	1.900
BENDAHARA	7	890	1.900
PENGADMINISTRASI KEUANGAN	5	490	1.900
ANALIS PERENCANAAN PROGRAM	7	890	1.900
KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN PEMERINTAHAN DESA	11	2.045	1.900
KEPALA SEKSI LEMBAGA PEMERINTAHAN DESA	8	1.295	1.900
PENYUSUN BAHAN PROSES PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN DAN KETENAGAAN	7	890	1.900
PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	1.900
KEPALA SEKSI ADMINISTRASI DESA	8	1.295	1.900
PENGOLAH DATA	6	690	1.900
PENGELOLA PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN	6	690	1.900
PENGELOLA KEKAYAAN DESA DAN ADMINISTRASI DESA	6	690	1.900
KEPALA SEKSI LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA	8	1.295	1.900
PENGELOLA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELEMBAGAAN	6	690	1.900
PENGOLAH DATA	6	690	1.900

KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN EKONOMI PERDESAAN	11	2.045	1.900
PRANATA SUMBER DAYA IPTEK	6	690	1.900
PENGOLAH DATA	6	690	1.900
KEPALA SEKSI SUMBER DAYA ALAM DAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA PERDESAAN	8	1.295	1.900
KEPALA SEKSI USAHA EKONOMI PERDESAAN	8	1.295	1.900
PENGOLAH DATA	6	690	1.900
PENYUSUN RENCANA PENGEMBANGAN PRODUK SKALA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH	7	890	1.900
KEPALA SEKSI LEMBAGA EKONOMI MASYARAKAT PERDESAAN	8	1.295	1.900
ANALIS PENGEMBANGAN EKONOMI PEDESAAN	7	890	1.900
PENGOLAH DATA	6	690	1.900
KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN PEMBANGUNAN DESA	11	2.045	1.900
KEPALA SEKSI PENDAMPINGAN PEMBANGUNAN PERDESAAN	8	1.295	1.900
PENGOLAH DATA	6	690	1.900
PENGELOLA PEMBINAAN DAN ANALISIS PEMBANGUNAN	6	690	1.900
KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN PEMBANGUNAN MASYARAKAT PERDESAAN	8	1.295	1.900
PENGELOLA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	6	690	1.900
PENGOLAH DATA	6	690	1.900
KEPALA SEKSI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA	8	1.295	1.900
PENGOLAH DATA	6	690	1.900
PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DESA	6	690	1.900
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN	14	2.865	1.900
SEKRETARIS	11	2.045	1.900

9. **DINAS PERHUBUNGAN**

KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	8	1.295	1.900
PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	5	490	1.900
PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	1.900
PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	6	690	1.900
KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN, PERENCANAAN DAN PELAPORAN	9	1.430	1.900
ANALIS RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN	7	890	1.900
PENGADMINISTRASI KEUANGAN	5	490	1.900
BENDAHARA	7	890	1.900
PENGADMINISTRASI PERENCANAAN DAN PROGRAM	5	490	1.900
KEPALA BIDANG LALU LINTAS	11	2.045	1.900
KEPALA SEKSI MANAJEMEN REKAYASA LALU LINTAS	8	1.295	1.900
PENGADMINISTRASI LLAJ	5	490	1.900
ANALIS TEKNIK SURVEY MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS	7	890	1.900
PENGELOLA REKAYASA LALU LINTAS	6	690	1.900
KEPALA SEKSI DATA DAN INFORMATIKA LLAJ	9	1.430	1.900
ANALIS LALU LINTAS	7	890	1.900
PENGADMINISTRASI LLAJ	5	490	1.900
ANALIS ANGKUTAN DARAT	7	890	1.900
PENGELOLA SISTEM PELAYANAN ANGKUTAN	6	690	1.900
KEPALA SEKSI PENERANGAN JALAN UMUM	8	1.295	1.900
PENGELOLA PENERANGAN JALAN	6	690	1.900
PENGELOLA PENERANGAN JALAN	6	690	1.900
TEKNISI PERALATAN, LISTRIK DAN ELEKTRONIKA	5	490	1.900
PEMELIHARA PENERANGAN JALAN	3	340	1.900

KEPALA BIDANG ANGKUTAN	11	2.045	1.900
KEPALA SEKSI ANGKUTAN ORANG DAN TERMINAL	8	1.295	1.900
PENGADMINISTRASI KARCIS	5	490	1.900
PENGAWAS ANGKUTAN DAN TERMINAL	7	890	1.900
PENGELOLA PERIZINAN ANGKUTAN JALAN	6	690	1.900
PENGADMINISTRASI LLAJ	5	490	1.900
JURU PUNGUT RETRIBUSI	3	340	1.900
KEPALA SEKSI ANGKUTAN BARANG, KHUSUS DAN LAUT	9	1.430	1.900
ANALIS PERIZINAN	7	890	1.900
PENGELOLA SARANA ANGKUTAN	6	690	1.900
ANALIS ANGKUTAN DARAT	7	890	1.900
ANALIS ANGKUTAN LAUT	7	890	1.900
PENGELOLA USAHA ANGKUTAN	6	690	1.900
KEPALA BIDANG PENGENDALIAN DAN OPERASI	11	2.045	1.900
KEPALA SEKSI KETERTIBAN DAN KESELAMATAN JALAN	8	1.295	1.900
PENGAWAS KESELAMATAN DARAT/ JALAN	7	890	1.900
PRANATA TILANG	6	690	1.900
PENGADMINISTRASI KECELAKAAN LLAJ	5	490	1.900
PENYUSUN PROGRAM KESELAMATAN ANGKUTAN JALAN	7	890	1.900
KEPALA SEKSI PENGELOLAAN DAN PENGENDALIAN PERPARKIRAN	8	1.295	1.900
PENGADMINISTRASI KARCIS	5	490	1.900
PENGELOLA PERPARKIRAN	6	690	1.900
JURU PUNGUT RETRIBUSI	3	340	1.900
KEPALA UPT PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR	8	1.295	1.900
PENGELOLA DATA	6	690	1.900
PENGADMINISTRASI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR	5	490	1.900

10.	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	1.900
		PENYUSUN RENCANA PENGUJIAN	7	890	1.900
		PENGAWAS PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR	7	890	1.900
		PENGADMINISTRASI CONTOH UJI	5	490	1.900
		PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR (PELAKSANA LANJUTAN)	7	955	1.900
		PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR TERAMPIL (PELAKSANA)	6	740	1.900
		PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR TERAMPIL (PENYELIA)	8	1.230	1.900
		KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	14	2.865	1.900
		SEKRETARIS	11	2.045	1.900
		KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN, PERENCANAAN DAN PELAPORAN	8	1.295	1.900
		PENGOLAH DATA	6	690	1.900
		PENGADMINISTRASI KEUANGAN	5	490	1.900
		PENGADMINISTRASI PERENCANAAN DAN PROGRAM	5	490	1.900
		ANALIS RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN	7	890	1.900
		BENDAHARA	7	890	1.900
		KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	8	1.295	1.900
		PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	6	690	1.900
		PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	5	490	1.900
		PENGOLAH DATA	6	690	1.900
		PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	1.900
		PETUGAS KEAMANAN	3	340	
		PRAMU KEBERSIHAN	1	190	
		PENGEMUDI	3	340	
KEPALA BIDANG E-GOVERNMENT DAN STATISTIK	11	2.045	1.900		

KEPALA SEKSI PENYELENGGARAAN E- GOVERNMENT	8	1.295	1.900
PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI	6	690	1.900
PENGOLAH DATA	6	690	1.900
PENGELOLA DATABASE	6	690	1.900
KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI	8	1.295	1.900
PENGOLAH DATA	6	690	1.900
PERANCANG GRAFIS	7	890	1.900
OPERATOR KOMPUTER GRAFIS	3	340	
PENGELOLA SITUS/ WEB	6	690	1.900
TEKNISI PRODUKSI MULTIMEDIA DAN WEB	5	490	1.900
KEPALA SEKSI DATA DAN STATISTIK	8	1.295	1.900
PENGOLAH DATA	6	690	1.900
ANALIS DATA DAN INFORMASI	7	890	1.900
ANALIS INFORMASI	7	890	1.900
KEPALA BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	11	2.045	1.900
KEPALA SEKSI PENGELOLAAN KOMUNIKASI PUBLIK	8	1.295	1.900
PENGOLAH DATA	6	690	1.900
TENAGA PELIPUTAN	6	690	1.900
PENYUSUN BAHAN PUBLIKASI	7	890	1.900
PENGELOLA MEDIA CENTER DAN KEMITRAAN MEDIA	6	690	1.900
PENGELOLA SITUS/ WEB	6	690	1.900
PENGELOLA TV DAN RADIO	6	690	1.900
OPERATOR RADIO	5	490	1.900
KEPALA SEKSI PENGELOLAAN OPINI DAN ASPIRASI PUBLIK	8	1.295	1.900
PENGELOLA PENGADUAN PUBLIK	6	690	1.900
PENYUSUN BERITA DAN PENDAPAT UMUM	7	890	1.900
PENGOLAH DATA	6	690	1.900

PENGELOLA SITUS/ WEB	6	690	1.900
PENGELOLA SISTEM INFORMASI	6	690	1.900
PENGADMINISTRASI KEUANGAN	5	490	1.900
KEPALA SEKSI PENGELOLAAN INFORMASI	8	1.295	1.900
PENGOLAH DATA	6	690	1.900
OPERATOR TRANSMISI SANDI	5	490	1.900
ANALIS PERSANDIAN	7	890	1.900
OPERATOR SANDI DAN TELEKOMUNIKASI	5	490	1.900
PENGELOLA KEAMANAN SISTEM INFORMASI	6	690	1.900
PENGELOLA SISTEM DAN JARINGAN	6	690	1.900
KEPALA BIDANG INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI	11	2.045	1.900
KEPALA SEKSI LAYANAN INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI	8	1.295	1.900
PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI	6	690	1.900
PENGELOLA DATABASE	6	690	1.900
PENGELOLA SISTEM DAN JARINGAN	6	690	1.900
TEKNISI JARINGAN INSTALASI	5	490	1.900
PENGOLAH DATA	6	690	1.900
KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN APLIKASI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI	8	1.295	1.900
PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI	6	690	1.900
PENGELOLA DATABASE	6	690	1.900
PENGOLAH DATA	6	690	1.900
KEPALA SEKSI KEAMANAN INFORMASI DAN PERSANDIAN	8	1.295	1.900
OPERATOR TRANSMISI SANDI	5	490	1.900

		ANALIS PERSANDIAN	7	890	1.900
		OPERATOR SANDI DAN TELEKOMUNIKASI	5	490	1.900
		PENGELOLA SISTEM DAN JARINGAN	6	690	1.900
		PENGOLAH DATA	6	690	1.900
11.	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN	KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN	14	2.865	1.900
		SEKRETARIS	11	2.045	1.900
		KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	8	1.295	1.900
		PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	6	690	1.900
		PENGOLAH DATA	6	690	1.900
		PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	5	490	1.900
		PRANATA KEARSIPAN	6	690	1.900
		PENGEMUDI	3	340	
		PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	1.900
		PRAMU BAKTI	1	190	
		PETUGAS KEAMANAN	3	340	
		KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN, PERENCANAAN DAN PELAPORAN	9	1.430	1.900
		PENGOLAH DATA	6	690	1.900
		PENGADMINISTRASI PERENCANAAN DAN PROGRAM	5	490	1.900
		BENDAHARA	7	890	1.900
		ANALIS RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN	7	890	1.900
		PENGADMINISTRASI KEUANGAN	5	490	1.900
		KEPALA BIDANG USAHA MIKRO	11	2.045	1.900
		KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN PRODUK DAN PEMASARAN	8	1.295	1.900
		PENGOLAH DATA	6	690	1.900
		KEPALA SEKSI KEWIRAUSAHAAN	8	1.295	1.900
		PENGOLAH DATA	6	690	1.900
		KEPALA SEKSI FASILITASI DAN PERMODALAN	8	1.295	1.900
		PENGOLAH DATA	6	690	1.900
		KEPALA BIDANG KOPERASI	11	2.045	1.900

		KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	8	1.295	1.900
		PENGOLAH DATA	6	690	1.900
		PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	1.900
		KEPALA SEKSI FASILITASI DAN PEMBIAYAAN KOPERASI	8	1.295	1.900
		PENGOLAH DATA	6	690	1.900
		PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	1.900
		KEPALA SEKSI KELEMBAGAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI	8	1.295	1.900
		PENGADMINISTRASI KEUANGAN	5	490	1.900
		PENGOLAH DATA	6	690	1.900
		KEPALA BIDANG PERDAGANGAN	11	2.045	1.900
		KEPALA SEKSI METROLOGI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	8	1.295	1.900
		PENGOLAH DATA	6	690	1.900
		KEPALA SEKSI DISTRIBUSI DAN PROMOSI	8	1.295	1.900
		PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	1.900
		PENGOLAH DATA	6	690	1.900
		KEPALA SEKSI BINA USAHA PERDAGANGAN	8	1.295	1.900
		PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	1.900
		PENGOLAH DATA	6	690	1.900
		KEPALA UPT PASAR DAERAH	9	1.430	1.900
		PENAGIH RETRIBUSI	5	490	1.900
		PENERA AHLI PERTAMA	7	890	1.900
	12. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	14	2.865	1.900
		SEKRETARIS	11	2.045	1.900
		KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, PELAPORAN DAN KEUANGAN	9	1.430	1.900

BENDAHARA	7	890	1.900
PENGADMINISTRASI KEUANGAN	5	490	1.900
ANALIS PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN	7	890	1.900
PENGADMINISTRASI PERENCANAAN DAN PROGRAM	5	490	1.900
PENGOLAH DATA	6	690	1.900
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	8	1.295	1.900
PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	5	490	1.900
PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	1.900
PRANATA KEARSIPAN	6	690	1.900
PENGEMUDI	3	340	
PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	6	690	1.900
PRAMU BAKTI	1	190	
KEPALA BIDANG PENCEGAHAN, KESIAPSIAGAAN DAN KEDARURATAN	11	2.045	1.900
KEPALA SEKSI PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN	8	1.295	1.900
PENGOLAH DATA	6	690	1.900
PRANATA BENCANA	6	690	1.900
PENGOLAH BAHAN UNTUK RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA	6	690	1.900
PENYULUH BENCANA	7	890	1.900
KEPALA SEKSI KEDARURATAN	9	1.430	1.900
PRANATA BENCANA	6	690	1.900
ANALIS MITIGASI BENCANA	7	890	1.900
ANALIS BENCANA	7	890	1.900
KEPALA BIDANG LOGISTIK REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI	11	2.045	1.900
KEPALA SEKSI LOGISTIK	8	1.295	1.900

		KOORDINATOR PERGUDANGAN	7	890	1.900
		PENGOLAH DATA	6	690	1.900
		PENYUSUN RENCANA KEBUTUHAN LOGISTIK	7	890	1.900
		KEPALA SEKSI REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI	8	1.295	1.900
		PENGOLAH DATA	6	690	1.900
13.	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	14	2.865	1.900
		SEKRETARIS	11	2.045	1.900
		KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	8	1.295	1.900
		PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	1.900
		PETUGAS KEAMANAN	3	340	
		PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	6	690	1.900
		PENGOLAH DATA	6	690	1.900
		KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN, PERENCANAAN DAN PELAPORAN	9	1.430	1.900
		BENDAHARA	7	890	1.900
		PENGOLAH DATA	6	690	1.900
		PENGADMINISTRASI KEUANGAN	5	490	1.900
		ANALIS RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN	7	890	1.900
		PENGADMINISTRASI PERENCANAAN DAN PROGRAM	5	490	1.900
		KEPALA BIDANG PERPUSTAKAAN	11	2.045	1.900
		KEPALA SEKSI LAYANAN DAN PELESTARIAN BAHAN PUSTAKA	8	1.295	1.900
		PENGADMINISTRASI PERPUSTAKAAN	5	490	1.900
		PENGELOLA PERPUSTAKAAN	6	690	1.900
		KEPALA SEKSI DEPOSIT, PENGEMBANGAN DAN PENGOLAHAN BAHAN PUSTAKA	8	1.295	1.900
		PENGAWAS PERPUSTAKAAN	7	890	1.900
		PENGELOLA PUSTAKA ELEKTRONIK	6	690	1.900

		KEPALA SEKSI PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA PERPUSTAKAAN	8	1.295	1.900
		PENGOLAH DATA	6	690	1.900
		KEPALA BIDANG KEARSIPAN	11	2.045	1.900
		KEPALA SEKSI PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS	8	1.295	1.900
		PENGOLAH DATA	6	690	1.900
		PRANATA KEARSIPAN	6	690	1.900
		KEPALA SEKSI PENGELOLAAN ARSIP STATIS	8	1.295	1.900
		PRANATA KEARSIPAN	6	690	1.900
		PRANATA REPRODUKSI ARSIP	6	690	1.900
		KEPALA SEKSI PEMBINAAN PEMASYARAKATAN ARSIP	8	1.295	1.900
		PENYULUH KEARSIPAN	7	890	1.900
		PRANATA KEARSIPAN	6	690	1.900
		ARSIPARIS MAHIR/PELAKSANA LANJUTAN	7	955	1.900
		PUSTAKAWAN TERAMPIL (PELAKSANA)	6	740	1.900
14.	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	KEPALA KANTOR BANGSA DAN POLITIK	13	2.465	1.900
		KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA	9	1.430	1.900
		PENGADMINISTRASI PERENCANAAN DAN PROGRAM	5	490	1.900
		BENDAHARA	7	890	1.900
		PENGADMINISTRASI KEUANGAN	5	490	1.900
		VERIFIKATOR DATA LAPORAN KEUANGAN	6	690	1.900
		PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	1.900
		PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	6	690	1.900
		KEPALA SEKSI KESATUAN BANGSA	8	1.295	1.900
		PENGADMINISTRASI KEUANGAN	5	490	1.900
		PENGOLAH DATA	6	690	1.900
		ANALIS PENDAYAGUNAAN LEMBAGA KEAGAMAAN	7	890	1.900

		ANALIS PERMASALAHAN	7	890	1.900
		PENGOLAH DATA BERKAS SENGKETA	6	690	1.900
		PENGELOLA DATA KEIMIGRASIAN	6	690	1.900
		ANALIS OPERASI INTELIJEN KEIMIGRASIAN	7	890	1.900
		ANALIS FORUM KERUKUNAN UMAT	7	890	1.900
		ANALIS FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT	7	890	1.900
		ANALIS KEBIJAKAN PENGABDIAN MASYARAKAT	7	890	1.900
		ANALIS ORGANISASI MASYARAKAT	7	890	1.900
		ANALIS DATA INTELIJEN	7	890	1.900
		ANALIS INTELIJEN	7	890	1.900
		KEPALA SEKSI BINA IDEOLOGI DAN POLITIK DALAM NEGERI	8	1.295	1.900
		ANALIS PARTAI POLITIK	7	890	1.900
		PENGOLAH DATA	6	690	1.900
		ANALIS PEMILIHAN UMUM	7	890	1.900
15.	KECAMATAN TRENGGALEK	CAMAT TRENGGALEK	12	2.315	1.900
		SEKRETARIS	11	2.090	1.900
		KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, PELAPORAN DAN KEUANGAN	9	1.430	1.900
		BENDAHARA	7	890	1.900
		PENGADMINISTRASI KEUANGAN	5	490	1.900
		PENGOLAH DATA	6	690	1.900
		KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	8	1.295	1.900
		PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	1.900
		PENGOLAH DATA	6	690	1.900
		PENGEMUDI	3	340	
		PETUGAS KEAMANAN	3	340	
		PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	6	690	1.900
		KEPALA SEKSI TATA PEMERINTAHAN	8	1.295	1.900
		PENGOLAH DATA	6	690	1.900
		PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	1.900
		KEPALA SEKSI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	8	1.295	1.900
		PENGOLAH DATA	6	690	1.900

		PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	1.900
		KEPALA SEKSI PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	8	1.295	1.900
		PENGOLAH DATA	6	690	1.900
		PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	1.900
		KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN RAKYAT	8	1.295	1.900
		PENGOLAH DATA	6	690	1.900
		PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	1.900
16.	KECAMATAN POGALAN	CAMAT POGALAN	12	2.315	1.900
		SEKRETARIS	11	2.090	1.900
		KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, PELAPORAN DAN KEUANGAN	9	1.430	1.900
		BENDAHARA	7	890	1.900
		PENGADMINISTRASI KEUANGAN	5	490	1.900
		PENGOLAH DATA	6	690	1.900
		KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	8	1.295	1.900
		PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	1.900
		PENGOLAH DATA	6	690	1.900
		PENGEMUDI	3	340	
		PETUGAS KEAMANAN	3	340	
		PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	6	690	1.900
		KEPALA SEKSI TATA PEMERINTAHAN	8	1.295	1.900
		PENGOLAH DATA	6	690	1.900
		PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	1.900
		KEPALA SEKSI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	8	1.295	1.900
		PENGOLAH DATA	6	690	1.900
		PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	1.900
		KEPALA SEKSI PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	8	1.295	1.900
		PENGOLAH DATA	6	690	1.900
		PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	1.900
		KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN RAKYAT	8	1.295	1.900
		PENGOLAH DATA	6	690	1.900
		PENGADMINISTRASI	5	490	1.900

		UMUM			
17. KECAMATAN DURENAN		CAMAT DURENAN	12	2.315	1.900
		SEKRETARIS	11	2.090	1.900
		KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, PELAPORAN DAN KEUANGAN	9	1.430	1.900
		BENDAHARA	7	890	1.900
		PENGADMINISTRASI KEUANGAN	5	490	1.900
		PENGOLAH DATA	6	690	1.900
		KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	8	1.295	1.900
		PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	1.900
		PENGOLAH DATA	6	690	1.900
		PENGEMUDI	3	340	
		PETUGAS KEAMANAN	3	340	
		PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	6	690	1.900
		KEPALA SEKSI TATA PEMERINTAHAN	8	1.295	1.900
		PENGOLAH DATA	6	690	1.900
		PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	1.900
		KEPALA SEKSI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	8	1.295	1.900
		PENGOLAH DATA	6	690	1.900
		PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	1.900
		KEPALA SEKSI PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	8	1.295	1.900
		PENGOLAH DATA	6	690	1.900
		PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	1.900
		KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN RAKYAT	8	1.295	1.900
		PENGOLAH DATA	6	690	1.900
	PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	1.900	
18. KECAMATAN WATULIMO		CAMAT WATULIMO	12	2.315	1.900
		SEKRETARIS	11	2.090	1.900
		KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, PELAPORAN DAN KEUANGAN	9	1.430	1.900
		BENDAHARA	7	890	1.900
		PENGADMINISTRASI KEUANGAN	5	490	1.900
		PENGOLAH DATA	6	690	1.900
		KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	8	1.295	1.900

		PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	1.900
		PENGOLAH DATA	6	690	1.900
		PENGEMUDI	3	340	
		PETUGAS KEAMANAN	3	340	
		PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	6	690	1.900
		KEPALA SEKSI TATA PEMERINTAHAN	8	1.295	1.900
		PENGOLAH DATA	6	690	1.900
		PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	1.900
		KEPALA SEKSI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	8	1.295	1.900
		PENGOLAH DATA	6	690	1.900
		PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	1.900
		KEPALA SEKSI PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	8	1.295	1.900
		PENGOLAH DATA	6	690	1.900
		PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	1.900
		KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN RAKYAT	8	1.295	1.900
		PENGOLAH DATA	6	690	1.900
		PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	1.900
		KEPALA SEKSI PELAYANAN DAN PERIZINAN	8	1.295	1.900
		PENGOLAH DATA	6	690	1.900
		PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	1.900
19.	KECAMATAN MUNJUNGAN	CAMAT MUNJUNGAN	12	2.315	1.900
		SEKRETARIS	11	2.090	1.900
		KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, PELAPORAN DAN KEUANGAN	9	1.430	1.900
		BENDAHARA	7	890	1.900
		PENGADMINISTRASI KEUANGAN	5	490	1.900
		PENGOLAH DATA	6	690	1.900
		KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	8	1.295	1.900
		PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	1.900
		PENGOLAH DATA	6	690	1.900
		PENGEMUDI	3	340	

		PETUGAS KEAMANAN	3	340	
		PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	6	690	1.900
		KEPALA SEKSI TATA PEMERINTAHAN	8	1.295	1.900
		PENGOLAH DATA	6	690	1.900
		PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	1.900
		KEPALA SEKSI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	8	1.295	1.900
		PENGOLAH DATA	6	690	1.900
		PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	1.900
		KEPALA SEKSI PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	8	1.295	1.900
		PENGOLAH DATA	6	690	1.900
		PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	1.900
		KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN RAKYAT	8	1.295	1.900
		PENGOLAH DATA	6	690	1.900
		PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	1.900
20.	KECAMATAN KAMPAK	CAMAT KAMPAK	12	2.315	1.900
		SEKRETARIS	11	2.090	1.900
		KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, PELAPORAN DAN KEUANGAN	9	1.430	1.900
		BENDAHARA	7	890	1.900
		PENGADMINISTRASI KEUANGAN	5	490	1.900
		PENGOLAH DATA	6	690	1.900
		KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	8	1.295	1.900
		PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	1.900
		PENGOLAH DATA	6	690	1.900
		PENGEMUDI	3	340	
		PETUGAS KEAMANAN	3	340	
		PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	6	690	1.900
		KEPALA SEKSI TATA PEMERINTAHAN	8	1.295	1.900
		PENGOLAH DATA	6	690	1.900
		PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	1.900
		KEPALA SEKSI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	8	1.295	1.900
		PENGOLAH DATA	6	690	1.900

		PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	1.900
		KEPALA SEKSI PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	8	1.295	1.900
		PENGOLAH DATA	6	690	1.900
		PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	1.900
		KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN RAKYAT	8	1.295	1.900
		PENGOLAH DATA	6	690	1.900
		PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	1.900
21.	KECAMATAN GANDUSARI	CAMAT GANDUSARI	12	2.315	1.900
		SEKRETARIS	11	2.090	1.900
		KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, PELAPORAN DAN KEUANGAN	9	1.430	1.900
		BENDAHARA	7	890	1.900
		PENGADMINISTRASI KEUANGAN	5	490	1.900
		PENGOLAH DATA	6	690	1.900
		KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	8	1.295	1.900
		PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	1.900
		PENGOLAH DATA	6	690	1.900
		PENGEMUDI	3	340	
		PETUGAS KEAMANAN	3	340	
		PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	6	690	1.900
		KEPALA SEKSI TATA PEMERINTAHAN	8	1.295	1.900
		PENGOLAH DATA	6	690	1.900
		PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	1.900
		KEPALA SEKSI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	8	1.295	1.900
		PENGOLAH DATA	6	690	1.900
		PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	1.900
		KEPALA SEKSI PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	8	1.295	1.900
		PENGOLAH DATA	6	690	1.900
		PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	1.900
		KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN RAKYAT	8	1.295	1.900
		PENGOLAH DATA	6	690	1.900
		PENGADMINISTRASI	5	490	1.900

		UMUM			
22.	KECAMATAN KARANGAN	CAMAT KARANGAN	12	2.315	1.900
		SEKRETARIS	11	2.090	1.900
		KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, PELAPORAN DAN KEUANGAN	9	1.430	1.900
		BENDAHARA	7	890	1.900
		PENGADMINISTRASI KEUANGAN	5	490	1.900
		PENGOLAH DATA	6	690	1.900
		KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	8	1.295	1.900
		PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	1.900
		PENGOLAH DATA	6	690	1.900
		PENGEMUDI	3	340	1.900
		PETUGAS KEAMANAN	3	340	1.900
		PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	6	690	1.900
		KEPALA SEKSI TATA PEMERINTAHAN	8	1.295	1.900
		PENGOLAH DATA	6	690	1.900
		PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	1.900
		KEPALA SEKSI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	8	1.295	1.900
		PENGOLAH DATA	6	690	1.900
		PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	1.900
		KEPALA SEKSI PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	8	1.295	1.900
		PENGOLAH DATA	6	690	1.900
		PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	1.900
KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN RAKYAT	8	1.295	1.900		
PENGOLAH DATA	6	690	1.900		
PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	1.900		
23.	KECAMATAN SURUH	CAMAT SURUH	12	2.315	1.900
		SEKRETARIS	11	2.090	1.900
		KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, PELAPORAN DAN KEUANGAN	9	1.430	1.900
		BENDAHARA	7	890	1.900
		PENGADMINISTRASI KEUANGAN	5	490	1.900
		PENGOLAH DATA	6	690	1.900
		KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	8	1.295	1.900

		PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	1.900
		PENGOLAH DATA	6	690	1.900
		PENGEMUDI	3	340	
		PETUGAS KEAMANAN	3	340	
		PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	6	690	1.900
		KEPALA SEKSI TATA PEMERINTAHAN	8	1.295	1.900
		PENGOLAH DATA	6	690	1.900
		PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	1.900
		KEPALA SEKSI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	8	1.295	1.900
		PENGOLAH DATA	6	690	1.900
		PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	1.900
		KEPALA SEKSI PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	8	1.295	1.900
		PENGOLAH DATA	6	690	1.900
		PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	1.900
		KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN RAKYAT	8	1.295	1.900
		PENGOLAH DATA	6	690	1.900
		PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	1.900
24. KECAMATAN DONGKO		CAMAT DONGKO	12	2.315	1.900
		SEKRETARIS	11	2.090	1.900
		KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, PELAPORAN DAN KEUANGAN	9	1.430	1.900
		BENDAHARA	7	890	1.900
		PENGADMINISTRASI KEUANGAN	5	490	1.900
		PENGOLAH DATA	6	690	1.900
		KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	8	1.295	1.900
		PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	1.900
		PENGOLAH DATA	6	690	1.900
		PENGEMUDI	3	340	
		PETUGAS KEAMANAN	3	340	
		PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	6	690	1.900
		KEPALA SEKSI TATA PEMERINTAHAN	8	1.295	1.900
		PENGOLAH DATA	6	690	1.900

		PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	1.900
		KEPALA SEKSI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	8	1.295	1.900
		PENGOLAH DATA	6	690	1.900
		PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	1.900
		KEPALA SEKSI PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	8	1.295	1.900
		PENGOLAH DATA	6	690	1.900
		PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	1.900
		KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN RAKYAT	8	1.295	1.900
		PENGOLAH DATA	6	690	1.900
		PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	1.900
25.	KECAMATAN PULE	CAMAT PULE	12	2.315	1.900
		SEKRETARIS	11	2.090	1.900
		KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, PELAPORAN DAN KEUANGAN	9	1.430	1.900
		BENDAHARA	7	890	1.900
		PENGADMINISTRASI KEUANGAN	5	490	1.900
		PENGOLAH DATA	6	690	1.900
		KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	8	1.295	1.900
		PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	1.900
		PENGOLAH DATA	6	690	1.900
		PENGEMUDI	3	340	
		PETUGAS KEAMANAN	3	340	
		PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	6	690	1.900
		KEPALA SEKSI TATA PEMERINTAHAN	8	1.295	1.900
		PENGOLAH DATA	6	690	1.900
		PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	1.900
		KEPALA SEKSI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	8	1.295	1.900
		PENGOLAH DATA	6	690	1.900
		PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	1.900
		KEPALA SEKSI PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	8	1.295	1.900
		PENGOLAH DATA	6	690	1.900
		PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	1.900
		KEPALA SEKSI	8	1.295	1.900

		KESEJAHTERAAN RAKYAT			
		PENGOLAH DATA	6	690	1.900
		PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	1.900
26.	KECAMATAN PANGGUL	CAMAT PANGGUL	12	2.315	1.900
		SEKRETARIS	11	2.090	1.900
		KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	8	1.295	1.900
		PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	1.900
		PENGOLAH DATA	6	690	1.900
		PENGEMUDI	3	340	
		PETUGAS KEAMANAN	3	340	
		PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	6	690	1.900
		KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, PELAPORAN DAN KEUANGAN	9	1.430	1.900
		PENGOLAH DATA	6	690	1.900
		PENGADMINISTRASI KEUANGAN	5	490	1.900
		BENDAHARA	7	890	1.900
		KEPALA SEKSI TATA PEMERINTAHAN	8	1.295	1.900
		PENGOLAH DATA	6	690	1.900
		PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	1.900
		KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	8	1.295	1.900
		PENGOLAH DATA	6	690	1.900
		PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	1.900
		KEPALA SEKSI PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	8	1.295	1.900
		PENGOLAH DATA	6	690	1.900
		PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	1.900
		KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN RAKYAT	8	1.295	1.900
		PENGOLAH DATA	6	690	1.900
		PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	1.900
		KEPALA SEKSI PELAYANAN DAN PERIZINAN	8	1.295	1.900
		PENGOLAH DATA	6	690	1.900
PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	1.900		
27.	KECAMATAN TUGU	CAMAT TUGU	12	2.315	1.900
		SEKRETARIS	11	2.090	1.900

		KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, PELAPORAN DAN KEUANGAN	9	1.430	1.900
		BENDAHARA	7	890	1.900
		PENGADMINISTRASI KEUANGAN	5	490	1.900
		PENGOLAH DATA	6	690	1.900
		KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	8	1.295	1.900
		PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	1.900
		PENGOLAH DATA	6	690	1.900
		PENGEMUDI	3	340	
		PETUGAS KEAMANAN	3	340	
		PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	6	690	1.900
		KEPALA SEKSI TATA PEMERINTAHAN	8	1.295	1.900
		PENGOLAH DATA	6	690	1.900
		PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	1.900
		KEPALA SEKSI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	8	1.295	1.900
		PENGOLAH DATA	6	690	1.900
		PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	1.900
		KEPALA SEKSI PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	8	1.295	1.900
		PENGOLAH DATA	6	690	1.900
		PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	1.900
		KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN RAKYAT	8	1.295	1.900
		PENGOLAH DATA	6	690	1.900
		PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	1.900
28.	KECAMATAN BENDUNGAN	CAMAT BENDUNGAN	12	2.315	1.900
		SEKRETARIS	11	2.090	1.900
		KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, PELAPORAN DAN KEUANGAN	9	1.430	1.900
		BENDAHARA	7	890	1.900
		PENGADMINISTRASI KEUANGAN	5	490	1.900
		PENGOLAH DATA	6	690	1.900
		KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	8	1.295	1.900

		PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	1.900
		PENGOLAH DATA	6	690	1.900
		PENGEMUDI	3	340	
		PETUGAS KEAMANAN	3	340	
		PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	6	690	1.900
		KEPALA SEKSI TATA PEMERINTAHAN	8	1.295	1.900
		PENGOLAH DATA	6	690	1.900
		PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	1.900
		KEPALA SEKSI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	8	1.295	1.900
		PENGOLAH DATA	6	690	1.900
		PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	1.900
		KEPALA SEKSI PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	8	1.295	1.900
		PENGOLAH DATA	6	690	1.900
		PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	1.900
		KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN RAKYAT	8	1.295	1.900
		PENGOLAH DATA	6	690	1.900
		PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	1.900
29.	KELURAHAN TAMANAN	LURAH TAMANAN	9	1.540	1.800
		SEKRETARIS	8	1.320	1.800
		PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	1.800
		PENGADMINISTRASI KEUANGAN	5	490	1.800
		KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN, KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN DAN PELAYANAN UMUM	8	1.295	1.800
		PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	1.800
		KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN MASYARAKAT KELURAHAN	8	1.295	1.800
		PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	1.800
		KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN SARANA PRASARANA KELURAHAN	8	1.295	1.800

30.	KELURAHAN SURODAKAN	PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	1.800
		LURAH SURODAKAN	9	1.540	1.800
		SEKRETARIS	8	1.320	1.800
		PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	1.800
		PENGADMINISTRASI KEUANGAN	5	490	1.800
		KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN DAN PELAYANAN UMUM	8	1.295	1.800
		PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	1.800
		KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN MASYARAKAT KELURAHAN	8	1.295	1.800
		PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	1.800
		KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN SARANA PRASARANA KELURAHAN	8	1.295	1.800
		PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	1.800
		31.	KELURAHAN NGANTRU	LURAH NGANTRU	9
SEKRETARIS	8			1.320	1.800
PENGADMINISTRASI UMUM	5			490	1.800
PENGADMINISTRASI KEUANGAN	5			490	1.800
KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN DAN PELAYANAN UMUM	8			1.295	1.800
PENGADMINISTRASI UMUM	5			490	1.800
KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN MASYARAKAT KELURAHAN	8			1.295	1.800
PENGADMINISTRASI UMUM	5			490	1.800
KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN SARANA PRASARANA KELURAHAN	8			1.295	1.800
PENGADMINISTRASI UMUM	5			490	1.800
KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN SARANA PRASARANA KELURAHAN	8			1.295	1.800

32. KELURAHAN SUMBERGEDONG	PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	1.800
	LURAH SUMBERGEDONG	9	1.540	1.800
	SEKRETARIS	8	1.320	1.800
	PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	1.800
	PENGADMINISTRASI KEUANGAN	5	490	1.800
	KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN DAN PELAYANAN UMUM	8	1.295	1.800
	PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	1.800
	KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN MASYARAKAT KELURAHAN	8	1.295	1.800
	PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	1.800
	KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN SARANA PRASARANA KELURAHAN	8	1.295	1.800
	PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	1.800
	33. KELURAHAN KELUTAN	LURAH KELUTAN	9	1.540
PENGADMINISTRASI KEUANGAN		5	490	1.800
SEKRETARIS		8	1.320	1.800
PENGADMINISTRASI UMUM		5	490	1.800
KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN DAN PELAYANAN UMUM		8	1.295	1.800
PENGADMINISTRASI UMUM		5	490	1.800
KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN MASYARAKAT KELURAHAN		8	1.295	1.800
PENGADMINISTRASI UMUM		5	490	1.800
KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN SARANA PRASARANA KELURAHAN		8	1.295	1.800
PENGADMINISTRASI UMUM		5	490	1.800
PENGADMINISTRASI UMUM		5	490	1.800

	PENGADMINISTRASI UMUM	5	490	1.800
--	--------------------------	---	-----	-------

**BUPATI TRENGGALEK,
TTD
MOCHAMAD NUR ARIFIN**

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



ANIK SUWARNI

Nip . 19650919 199602 2 001

B. DAFTAR PERHITUNGAN PENERIMAAN TPP

NAMA PD :

BULAN :

TAHUN :

NO	NAMA	NAMA JABATAN	GOL. RUANG	NO. REKENING BANK	KELAS JABATAN	HARGA JABATAN	SATUAN HARGA JABATAN	TPP 100%	KETIDAKHADIRAN	JUMLAH TPP KOTOR	PPH 21	JUMLAH TPP DITERIMA	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7x8	10	11=9-(10*9)	12	13 = 11 - 12	14

Trenggalek ,

PENGGUNA ANGGARAN / KUASA PENGGUNA ANGGARAN

BENDAHARA PENGELUARAN

BENDAHARA GAJI

(NAMA)
Pangkat
NIP.

(NAMA)
Pangkat
NIP.

(NAMA)
Pangkat
NIP.

C. SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

NIP :

Jabatan :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

Perhitungan yang terdapat pada lembar verifikasi kehadiran dan daftar perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan Kelas Jabatan dan/atau Jabatan PNSD bulan Tahun pada telah dihitung dengan benar berdasarkan tingkat kehadiran pegawai dan penilaian kegiatan kedinasan.

Dan kami menyatakan bertanggungjawab secara penuh terhadap kebenaran informasi dalam lembar verifikasi kehadiran dan daftar perhitungan TPP berdasarkan Kelas Jabatan dan/atau Jabatan tersebut. Apabila, dikemudian hari ditemukan ketidaksesuaian atas pengajuan pemberian TPP tersebut, maka kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah Kabupaten Trenggalek dan mempertanggungjawabkannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

Trenggalek,
Pegguna Anggaran/ Kuasa
Pegguna Anggaran

BUPATI TRENGGALEK,
TTD
MOCHAMAD NUR ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ANIK SUWARNI

Nip . 19650919 199602 2 001